



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 221-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI JAWA BARAT**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

JAKARTA

SELASA, 9 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 221-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Jawa Barat.

PEMOHON

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 221-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Demokrat (Perkara Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Selasa, 9 Juli 2019, Pukul 07.59-11.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Wilma Silalahi
Rima Yuwana Y**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ace Kurnia
2. M. Ibnu

B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Tito Prayogi

C. Pemohon Perkara Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Andri W. Kusuma
2. Jeni Jayusman

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Yudha Indrapraja
2. Rahmat Setiabudi
3. Syarif
4. Martina

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Much. Alfarisi
2. Rakhmat Mulyana

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Dormauli Silalahi
2. Mehbob
3. Yandri Sudarso
4. Deny

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Akhmad Jazuli

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ardy Mbalembout

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. M. Hadrawi Ilham
2. Fitriati
3. Jou Hasyim
4. Asep Rudiyan

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 102-10-12PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Sona SP
2. A. Marpaung

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Rio Ramabaskara
2. Kornelius Widi N.
3. Saleh Hidayat
4. Raka Gani P.

L. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Dedi Mulyana
2. Sutikno

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Hendarsam
2. Y. Nurhayati
3. Dolfie Rompas

N. KPU:

1. Meisca Rafinda
2. Viryan

O. KPU Jawa Barat:

Reza Alwan

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait (PKS):

1. Basrizal
2. Evi Risna Y.
3. R. Hikmat Prihadi

Q. Bawaslu

Yusuf Kurnia

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.59 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Assalamualaikum wr. wb., om swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan memulai persidangan dan agenda kita yang pertama ini adalah untuk mendengarkan permohonan dari Pemohon. Tapi sebelum itu saya ingin Pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan mulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Partai ... untuk Partai PDI Perjuangan hari ini diwakili oleh saya Ace Kurnia dan di belakang saya Saudara M. Ibnu. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kemudian dari Partai Beringin Karya? Partai Beringin Karya belum hadir? Belum hadir? Nanti kalau hadir dilaporkan, ya! Ya. Kemudian, yang ketiga dari Partai Amanat Nasional siapa yang hadir? Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA

Partai Amanat Nasional hari ini diwakili oleh saya Yudha Indrapraja dan di belakang saya Rahmat Setiabudi, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Dari Partai Demokrat?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Assalamualaikum wr. wb. Partai Demokrat dalam hal ini diwakili oleh saya Yandri Sudarso, kemudian sebelah kanan saya Deny, kemudian sebelah kiri saya Uli, kemudian di sebelah kiri saya lagi Mehbob. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb. Kemudian dari Partai Persatuan Pembangunan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: HADRAWI ILHAM

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: HADRAWI ILHAM

Dari Partai Persatuan Pembangunan hadir saya sendiri M. Hadrawi Ilham kemudian di samping kiri saya, Jou Hasyim Waimahing, dan seterusnya Asep Rudiana. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Dari Partai Gerakan Indonesia Raya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Saya, Yang Mulia, dari Partai Gerakan Indonesia Raya saya, Saleh Hidayat dan ada teman-teman saya.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Baik. Dari KPU?

16. KUASA HUKUM TERMOHON PAN, GOLKAR, DAN BERKARYA: MUH. ALFARISI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Termohon hadir Prinsipal kami, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Meisca Rafinda.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mana? Oh, ya.

18. KUASA HUKUM TERMOHON PAN, GOLKAR, DAN BERKARYA: MUH. ALFARISI

Mungkin nanti para komisioner menyusul, Yang Mulia.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti disampaikan, ya Saudara.

20. KUASA HUKUM TERMOHON PAN, GOLKAR, DAN BERKARYA: MUH. ALFARISI

Ya. Kemudian, dari KPU Jawa Barat yaitu, Bapak Reza Alwan. Saya sendiri Muh. Alfarisi didampingi oleh rekan saya Bapak Rakhmat Mulyana dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partner, yang dalam hal ini kami mewakili Termohon untuk permohonan dari Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Berkarya. Untuk permohonan dari partai lain diwakili oleh kantor rekan yang lain, silakan!

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan!

22. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Terima kasih kepada Yang Mulia. Kami dari Termohon untuk mewakili kepentingan Perkara Nomor 156-02-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 dari permohonan ... Pemohon Partai Gerindra, dalam hal ini diwakili oleh saya sendiri Dedi Mulyana dan rekan kami Sutikno. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Dari Bawaslu belum hadir, ya? Belum hadir dari Bawaslu, nanti petugas kalau sudah hadir, mohon disampaikan! Kemudian, dari Pihak Terkait siapa yang hadir?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PKS: EVI RISNA YANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PKS: EVI RISNA YANTI

Kami Pihak Terkait dari PKS hadir saya sendiri, Evi Risna Yanti, kemudian di kanan saya ada Basrizal dan sebelah kiri saya Hikmat Prihadi. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Semua Kuasa, ya? Yang lain belum ada yang hadir? Nanti kepada petugas kalau pihak-pihak yang ... ada? Oh, dari Partai Gerindra? Tadi sudah di ... dipanggil, kan? Ha? Oh, Pihak Terkaitnya? Oh ya, silakan, silakan! Siapa? Di ... di depan Mas, satu, masih ada di situ. Ya. Kalau Bawaslu sudah datang mohon ... dimohon masuk. Silakan!

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT GERINDRA: HENDARSAM MARANTOKO

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Partai Gerindra untuk Pihak Terkaitnya yang hadir saya sendiri, Hendarsam Marantoko. Bersama rekan kami, Y. Nurhayati dan Dolfie Rompas. Terima kasih.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ada lagi Pihak Terkait yang lain? Yang ... silakan, siapa ini yang baru datang? Eh, sebelumnya kami mohon maaf kepada hadirin sekalian karena ruang sidang sebegini adanya, jadi dimohon pengertiannya. Kami harus mengaturnya agar semua pihak terwakili di dalam persidangan, sehingga mungkin tidak semua bisa hadir di ruangan ini dan karena keadaannya seperti ini. Ini dari Pihak Terkait mana yang baru hadir?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT GERINDRA:

Yang tadi yang Gerindra tadi, Yang Mulia (...)

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, dari yang dari (...)

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT GERINDRA:

Ambil barang di belakang.

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh ya, baik. Baik. Kita akan ... apa namanya ... yang pertama ini akan kita bagi sampai dengan pukul 10.00 WIB dan oleh karena itu, nanti kepada masing-masing Pemohon, kami alokasikan waktu kurang lebih 20 menit. Mohon dimanfaatkan dengan baik, tidak semua harus diucapkan dan harus dibacakan, tetapi poin-poin yang Saudara minta kepada Mahkamah serta argumentasinya yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon dengan waktu dan dalil Saudara, secara singkat, lalu Petitumnya. Tidak semua argumentasi perlu disampaikan di sini karena yang secara tertulis sudah kami terima sebelumnya dan kami sudah baca, tetapi karena sidang ini terbuka ada kewajiban bagi Saudara-Saudara untuk menyampaikan kepada publik tentang apa yang Saudara mohonkan kepada Mahkamah. Demikian ya. Baik, kita mulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik, terima kasih Yang Mulia.

Untuk Partai PDI Perjuangan bahwa Pemohon mengajukan keberatan sebagai objek adalah SK Pemohon Nomor 9087, dan seterusnya sepanjang berkenaan dengan pengisian kursi keanggotaan

DPR RI Dapil Jawa Barat VII, Yang Mulia. Adapun Pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeberatan terhadap penetapan perolehan suara secara nasional dikarenakan yang pertama ... khususnya berkenaan dengan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di Kabupaten Bekasi, yaitu di 4 kecamatan. Yang pertama, Kecamatan Tambun Selatan, Babelan, Cibitung, dan Cikarang Barat. Keberatan Pemohon ini dikarenakan dalam proses tersebut Termohon dalam melakukan rekapitulasi itu tidak ... tidak mendasarkan kepada hasil rekapitulasi dalam C-1 hologram, tetapi hanya menggunakan C-1 yang salinan biasa.

Nah yang kedua, adanya perbedaan penghitungan perolehan suara antara C-1 Plano dengan C-1 salinan, Yang Mulia. Sehingga, oleh karenanya dalam hal ini yang diuntungkan adalah Partai PKS bertambah perolehan suaranya sebesar 15.354 suara dan Partai Nasdem=9.970 suara di Kabupaten Bekasi dari 4 kecamatan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal itu Pemohon juga sudah mengajukan bukti dari P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, yang di antaranya adalah keberatan Pemohon di dalam proses rekapitulasi secara berjenjang dimulai dari rekapitulasi dalam pleno kabupaten, dalam hal ini di P-3, dan kemudian di tingkat provinsi di C-2, dan di tingkat nasional atau DD-2.

Oleh karenanya berdasarkan uraian tadi, Pemohon memohon kepada Mahkamah. Yang pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, dan seterusnya, sepanjang untuk Pemilihan Anggota DPR di Daerah Pemilihan Jawa Barat 7. Yang ketiga, memerintahkan agar Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang, khususnya di kolom 3 angka 1, semua TPS se-Kecamatan Tambun Selatan, semua TPS se-Kecamatan Babelan, semua TPS se-Kecamatan Cibitung, dan semua TPS se-Kecamatan Cikarang Barat. Poin 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melaksanakan keputusan ini. Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ditandatangani oleh Kuasa Hukum, di antaranya saya, Ace Kurnia dan M. Ibnu. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Jadi, itu poin yang Saudara sampaikan, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mengenai permohonan Saudara.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini KPU me ... merespons ... ada yang merespons ini, enggak? Nomor 156-02-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 tadi, ya? Untuk perkara nomor berapa Anda?

41. KUASA HUKUM TERMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL, GOLKAR, DAN BERKARYA: MUH. ALFARISI

Untuk PDIP ya ... PDIP (...)

42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada ... ada termasuk juga (...)

43. KUASA HUKUM TERMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL, GOLKAR, DAN BERKARYA: MUH. ALFARISI

Kuasa ... bu ... tidak ... kami tidak.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak. KPU yang merespons ini enggak ada?

45. KUASA HUKUM TERMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL, GOLKAR, DAN BERKARYA: MUH. ALFARISI

Kami ... belum hadir kuasanya.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum hadir. Mana Surat Kuasanya nanti diserahkan ke meja Hakim.

47. KUASA HUKUM TERMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL, GOLKAR, DAN BERKARYA: MUH. ALFARISI

Baik.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat Kuasa Anda itu sama Bawaslu dari mana? Bawaslu mana itu? Surat Kuasanya, ya.

49. BAWASLU RI:

Hadir Bawaslu Provinsi Jabar.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termasuk Pihak Terkait Surat Kuasanya biar diambil petugas.

51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Anda dua-duanya dari Bawaslu Jawa Barat?

52. BAWASLU RI:

Saya perwakilan dari Bawaslu RI, Pak.

53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, dari Bawaslu RI, ya.

54. BAWASLU RI:

Satu lagi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Siapa yang dari Provinsi Jawa Barat?

56. BAWASLU RI:

Hadir Komisioner, Pak.

57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, siapa namanya? Pak siapa?

58. BAWASLU JABAR: YUSUF KURNIA

Izin, Yang Mulia, Yusuf Kurnia.

59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Yusuf Kurnia, ya. silakan diambil dulu dokumennya yang diminta oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, petugas.

60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada Pemohon, Kuasanya dari PDIP tadi untuk asli Surat Kuasanya bersamaan dengan yang di Kepulauan Riau ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Kami secara umum, Surat Kuasa, 1, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Jadi, untuk keseluruhan perkara kita buat 1 yang asli, sisanya salinan, Yang Mulia. Ya, termasuk Kepri (...)

64. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang di ... termasuk yang di Kepri, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, betul.

66. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya, ya. Ini kita konfirmasi saja, ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih.

69. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan, dulu yang baru datang! Ya, di depan yang ... ada yang ... siapa yang di sini yang akan memberikan ... apa, tanggapan atau untuk permohonan dari PDI Perjuangan. Ada? Dari Pihak KPU yang ... dari Termohon yang akan memberikan itu? Dari Perkara Nomor 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019. Atau begini dulu, saya ... saya tanya dulu Saudara Kuasa itu Saudara Kuasa dari Termohon untuk perkara berapa? Nomor 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019?

70. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Nomor 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019, ya.

71. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berapa? Dua-duanya dari Nomor 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019? Siapa namanya Pak? Tolong di, di, di anu mic-nya supaya bisa direkam oleh sistem.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Nama saya, Akmad Jazuli, Pak.

73. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Akhmad Jazuli. Yang satu lagi?

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Rekan saya Pak Tito.

75. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Tito. Anda mewakili Termohon untuk perkara?

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Nomor 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019.

77. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nomor 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 saja, ya? Surat Kuasanya? Mohon petugas diambil! Saudara Pemohon Nomor 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 tidak ada renvoi untuk permohonan Saudara, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Tidak ada, Yang Mulia.

79. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Ya, kemudian Saudara melampirkan alat bukti.

80. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dua alat bukti.

81. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dua alat bukti, ya?

82. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Bukti P-1 nya itu objek permohonan, ya tapi Bukti 2?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Harusnya dia 7, Yang Mulia.

84. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha?

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Bukti yang saya bawa ini ada 7.

86. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, yang diserahkan waktu perbaikan permohonan baru 2.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Oh baru 2, Yang Mulia. Sebentar saya catat, Yang Mulia.

88. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukti P-1, yaitu Surat Keputusan Termohon Nomor 97, dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD bertanggal 21 Mei 2019.

P-2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan, Daerah Kabupaten Pemilihan Umum, Dapil Jawa Barat VII, untuk Kabupaten Bekasi. Baru itu yang ada pada kami.

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Akan dicek lagi, Yang Mulia di tim, apakah yang P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 ini sudah terkonfirmasi masuk. Karena dari pihak kami sudah diserahkan pada saat kemarin itu dan nanti akan kami lampirkan buktinya.

90. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, kalau itu kan ada nanti ... ada tanda terimanya. Yang jelas belum kami terima itu, ya.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Belum, belum terima. Baik, saya catat, Yang Mulia. Terima kasih.

92. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara yang bukti yang belum diserahkan kepada kami, tolong diberi ... dicatat dan kemudian Saudara beri tanda bukti sebagaimana layaknya ditentukan di dalam PMK.

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

94. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dengan demikian, maka bukti yang ... ya, yang ada baru ... baru yang ada pada kami itu baru-baru 2 ini dulu, ya.

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, Yang Mulia.

96. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, ini dulu bukti P-1 dan bukti P-2 yang isinya adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu yang kami sahkan karena sudah diverifikasi oleh ... oleh Mahkamah, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, karena partai apa namanya... Partai Berkarya belum datang, sehingga kita lompat ke Partai Amanat Nasional. Silakan, siapa yang jadi juru bicaranya?

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait, mohon izin sebentar.

98. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HIKMAT PRIHADI

Sebelum dilanjutkan ke Pemohon selanjutnya. Untuk keterangan Pihak Terkait dari PKS ada perbaikan, mohon ini akan diserahkan di sini atau di depan, Yang Mulia?

100. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ini untuk ... untuk yang Perkara Nomor 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019?

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI

Ya.

102. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti saja, ya.

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: HIKMAT PRIHADI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

104. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini masih kesempatan untuk Pemohon dulu ya.

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HIKMAT PRIHADI

Baik. Terima kasih.

106. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti, nanti disampaikan. Ya, silakan dari Partai Amanat Nasio ... Partai Amanat Nasional, siapa juru bicaranya?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA

Terima kasih, Yang Mulia.

108. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Waktunya sama ya.

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA

Baik. Untuk Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.KPT/06-KPU/V/2019 tentang Dokumen Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan Jakarta, 23 Mei 2019 tahun ... pukul 01.46 WIB.

Pokok Permohonan, Yang Mulia. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cimahi pada Daerah Pemilihan Cimahi II adalah sebagai berikut. Temuan adanya penghilangan suara di tingkat rekapitulasi PPK Kecamatan Cimahi Utara untuk Pemohon PAN pada TPS 43 Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara sebesar 21 suara sebagaimana terlampir sebagai berikut.

TPS 43 di Kelurahan Pasir Kaliki, C-1 yang kami miliki tercatat 23 suara, tapi di DAA tercatat 2 suara. Jumlah kehilangan suara=21 suara. Bahwa atas temuan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Cimahi pada tanggal 16 Mei 2019 dan telah menghasilkan Putusan Pengawas Pemilu yang memutuskan:

1. Menyatakan Ketua PPK Cimahi Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
2. Menyatakan Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
3. Memberikan peringatan tertulis kepada Ketua PPK Cimahi Utara.
4. Memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi.

Bahwa berdasarkan pada tabel tersebut di atas, maka disimpulkan sebagai berikut.

Terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pengurangan suara yang merugikan Pemohon sebesar 21 suara dan per ... bermohon ... kepada Yang ... dan bermohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan hak konstitusional tersebut pada Pemohon.

Petitum kami, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana berikut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang pada amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL0108-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei

2019 pukul 01.46 WIB sepanjang di daerah pemilihan Kota Cimahi II untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Cimahi.

3. Menyatakan mengembalikan kehilangan suara PAN sebesar 21 suara.
4. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Kota Cimahi, Dapil Kota Cimahi II adalah merupakan hak Pemohon.
5. Memberi ... memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan amar putusan ini. Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi ber ... lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ditandatangani oleh kami, Surya Imam Wahyudi, Andi Muhammad Yunus ... Yusuf, Shanti Dewi Mulyaharjani, Zulkarnain, Hery Chariansyah. Jubir: Rahmat Setiabudi dan Yudha Indrapraja.

Demikian, Yang Mulia.

110. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini sudah termasuk permohonan yang diajukan oleh Saudara Jeni Jayusman, belum?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA

Ini ... ini, Yang Mulia.

112. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu Saudara kuasanya sama juga?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA

Ya, Yang Mulia.

114. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

Jadi Saudara kuasa untuk PAN, baik yang diajukan oleh partai maupun yang diajukan oleh Jeni Jayusman?

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA

Ya.

116. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara kuasanya sama, ya? Gimana?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA

Untuk yang kasus Jeni Jayusman, ya? Ada prinsipalnya.

118. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, tapi Saudara kuasanya sama?

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA

Kuasanya sama.

120. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, yang mana anunya ... Prinsipalnya yang mana? Coba mohon berdiri! Oh, Pak Jeni ... Jeni Jayusman? Bisa ditunjukkan surat kuasanya pada kami? Ya? Ambil coba, Petugas! Ini kuasa untuk ... dari partai politik? Jadi, Pak Jeni ndak memberikan kuasa khusus?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Dari mana, Pak? Saya ke DPPF, Yang Mulia. Kemudian, partai mengeluarkan surat kuasa itu, Yang Mulia, dan itu sudah kami kirimkan ke (...)

122. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi ... ya, jadi ini logikanya ... apa namanya ... partai Saudara itu menganggap permohonan Saudara itu sebagai permohonan partai?

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Ya. Betul.

124. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Gitu?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Betul.

126. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sehingga kuasanya disatukan?

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Ya, seperti itu, Yang Mulia.

128. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak menyebutkan secara khusus? Begitu, ya?

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Betul, Yang Mulia.

130. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, yang kami terima itu surat kuasa dari Partai Amanat Nasional.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Betul, Pak.

132. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kami bias memahami logika yang digunakan karena saudara permohonan lewat partai, begitu, ya, tapi kan Anda sebagai perorangan justru akan berhadapan dengan pihak yang di partai Anda, begitu kan?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Oh, tidak, Pak. Ini ada kesalahan, Pak. Saya berhadir di sini itu dengan eksternal partai, Pak.

134. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya. Ya, tapi mestinya ada anu... ada secara khusus mestinya surat kuasa untuk itu. Karena ... walaupun dari partai yang sama kan ada beda kualifikasi, Saudara sebagai perorangan kalau Pemohon yang ini sebagai parpol. Sudah begitu, kan?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Mohon Yang Mulia izin. Jadi, atas keteledoran saya mungkin yang ... bukan keteledoran saya berperkara ini dengan partai lain, Pak.

136. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Ya, ya.

138. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Itu. Tetapi kan Saudara mengajukan diri sebagai perorangan?

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Oh.

140. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di anunya kan?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Jadi harusnya sama?

142. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mestinya kan ada surat kuasa khusus untuk itu?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Mengangkat yang bersangkutan.

144. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ya, untuk menyebutkan ... jadi, kan Anda sebagai perorangan. Nah, begini ada dua soal di sini, Anda sebagai perseorangan ... sebagai perorangan yang mengajukan ini karena bergabung dengan Partai Amanat Nasional harus ada tanda tangan ketua dan sekretaris jenderal, itu satu hal.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Ya, ya, Pak.

146. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah yang kedua, kalau sebagai Partai Amanat Nasional yang memberikan kuasa kepada bapak ini (...)

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Ya.

148. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu sudah selesai di surat kuasa ini?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Betul, Pak.

150. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, Anda sendiri belum ada surat kuasanya. Karena itu kan agak berbeda kualifikasi, walaupun sama-sama di Partai Amanat Nasional dan itu tidak diterangkan di dalam surat kuasanya.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Oh, begitu, Pak.

152. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena di dalam surat kuasanya itu hanya menerangkan Partai Amanat Nasional yang ditandatangani oleh Pak Zulkifli dan Sekjennya itu memberikan kuasa kepada Saudara Kuasa yang tadi ini.

Nah, jadi kalau sementara itu, kami meminta Saudara memberikan surat kuasa khusus kepada ini nanti dan sekarang yang berbicara adalah Saudara untuk menyampaikan permohonannya. Ya?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Terima kasih. Saya langsung Pak, Yang Mulia?

154. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Prinsipalnya langsung yang akan menyampaikan permohonannya dengan cara yang singkat seperti tadi itu, ya, pokok ... karena permohonannya kan sudah ada, sudah kami terima. Ya, itu. Supaya proses beracara kita benar. Ini tampak sebagai formalitas, tetapi itu harus kami lakukan, ya.

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Saya mengerti, Yang Mulia.

156. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Izin duduk atau berdiri?

158. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Boleh berdiri. Kalau biar kelihatan. Nanti kalau bilang duduk ndak lihat sama TV nanti.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Mohon duduk, Yang Mulia susah ini buka (...)

160. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, begitu. Silakan!

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Saya ... mohon izin, Yang Mulia. Saya langsung mulai dari pokok permohonan. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat pada Daerah Pemilihan Jabar XV adalah PKB 1 kursi, Gerindra 1 Kursi, PDIP 1 kursi, Golkar 1 kursi, PKS 1 kursi, PPP 1 kursi, dan PAN 1 kursi. Kemudian, dalam permohonan ... temuan dari kami kesimpulan ... kesimpulan dari kami adalah sebagai berikut.

Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi penggelembungan suara untuk Partai Gerindra yang merugikan Pemohon sebesar=1.656 suara. Yang mana suara Pemohon minta kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK dalam perkara ini agar menghilangkan suara penggelembungan tersebut.

2. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pengurangan atau penghilangan suara yang merugikan Pemohon sebesar=502 suara dan memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan kehilangan hak konstitusional tersebut kepada Pemohon.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan-permohonan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Barat XV untuk pengisian kursi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
3. Menyatakan menghilangkan penggelembungan suara untuk Partai Gerindra sebesar=1.656 suara.

4. Menyatakan mengembalikan kehilangan suara PAN sebesar=502 suara.
5. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
6. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar XV adalah merupakan haknya Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan amar putusan ini. Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian permohonan ini kami ajukan dengan harapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini berkenan mengabulkannya. Atas berkenannya kami haturkan terima kasih.

162. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara itu yang Saudara baca mana? Karena begini, ini ada peristiwa unik untuk Saudara ini. Kami hanya menerima 1 permohonan. Sebentar, jangan disela dulu saya. Saya hanya menerima 1 permohonan atas nama Saudara Jeni Jayusman yang diterima oleh Mahkamah pada hari Kamis tanggal 25 bulan 5 tahun 2019 pada pukul 18.49 WIB. Nah, kemudian di sini hanya Saudara mengatakan bahwasanya telah terjadi pelanggaran administrasi pencurian dan pengelembungan hasil suara yang terjadi pada tanggal 17 April 2019 untuk Pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat, daerah pemilihan XV meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Karena itu, kami minta Komisi Pemilihan Umum untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang terjadi di daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat XV dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar. Demikian surat permohonan ini dibuat dan akan kami lengkapi dengan daftar alat bukti ... alat bukti dileges berupa softcopy dan PDF. Kemudian, urutan berikutnya, Saudara mengirimkan utusan. Ya? Ya, kan?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Betul.

164. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mengeluarkan utusan yang tidak jelas juga. Konon menyebutkan sebagai pendamping, namanya Pak Pipit Setiawan?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Betul, Yang Mulia.

166. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul? Tetapi kemudian pendamping Saudara karena ketidaktahuannya, dia tidak memasukkan perbaikan permohonan?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Betul, Yang Mulia.

168. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan pemban ... pendamping itu juga tidak menyerahkan surat pendampingan kepada kami?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Betul.

170. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, bagaimana kami harus memperlakukan permohonan ini? Ya, itu, itu yang ... yang ... yang tidak bisa kami nilai lalu, ya? Tapi begini, karena ini adalah permohonan Saudara yang kami terima adalah seperti ini. Nanti tentu Termohon yang akan memberikan reaksi terhadap hal ini. Ya, itu nanti, nanti. Jawaban sekarang ndak perlu dulu. Sekarang anunya ini kan, masih anu ... haknya dari Pemohon dan adalah masih bagian dari kami untuk meminta kejelasan itu. Jadi, Saudara tidak memberikan ... ini juga sebagai bukti bahwa Saudara juga tidak memberikan kuasa kepada siapa-siapa. Ya, kan? Saudara hanya mengutus pendamping dan pendamping itu juga tidak dilengkapi dengan surat keterangan. Sesuai dengan hukum acara kan, kalau ada pendamping itu kan, harus diberikan keterangan sebagai pendamping, dan pendamping tidak mempunyai hak untuk berbicara. Kalau kuasa, berbeda. Kalau Kuasa Pemohon itu, di samping mempunyai hak untuk berbicara atas nama Saudara, dia melakukan sesua ... segala sesuatu yang Saudara berikan kuasa kepada dia secara khusus dalam surat kuasa.

Prinsipal mempunyai hak untuk berbicara. Tapi kalau pendamping, pertama dia harus ada surat keterangan pendampingan

sebagai pendamping dulu. Yang kedua, dia tidak mempunyai hak untuk berbicara dalam persidangan. Yang mempunyai hak untuk berbicara adalah Prinsipal, itu. Jadi, kami baru menerima format yang seperti ini. Andaikata pun. Andaikata pun ya, andaikata pun kami menerima dokumen lain, andaikata pun, ya? Kami menerima dokumen lain, kami tidak bisa memperlakukan itu sebagai permohonan Saudara karena yang disampaikan orang yang tidak kami tahu, dia sebagai apa. Hanya menyatakan sebagai pendamping tanpa keterangan apa pun dan itu pun tidak menyerahkan apa yang disampaikan karena menurut 'keterangan' yang disampaikan kepada petugas kami di Mahkamah Konstitusi karena ketidaktahuannya. Ini bagaimana Saudara beracara seperti ini, gitu? Itu yang anunya. Tapi baiklah, itu nanti kami yang akan mempertimbangkan sendiri dan nanti tentu itu akan direaksi oleh Termohon dan Pihak Terkait yang ... yang ... yang Saudara tuju dengan permohonan Saudara. Silakan duduk, Pak Jeni! Ya, itu dulu.

171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu tadi yang dibaca ya, kok bisa beda sekali dengan yang pernah disampaikan. Ada masalah apa sebenarnya?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Izin menjawab, Pak, Yang Mulia (...)

173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, jawablah!

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Jadi (...)

175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cepat, tapi!

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Gimana?

177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cepat!

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JENI JAYUSMAN

Ya. Koordinasi kayaknya, Pak. Yang ini. Saya betul yang dimaksud yang tadi itu saya mau ... mau membacakan yang ini tadi, Pak. Yang 1 lembar ini. Tapi perintah Yang Mulia seperti yang tadi. Nah, ini maksud saya pada kesempatan ini saya memohon untuk Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan perbaikan ke depannya.

179. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Perbaikan itu tidak yang substantif, Saudara. Dan itu kalau yang namanya perbaikan itu sudah ada pada kami dulu. Kalau perbaikan itu tidak ada sama sekali kan, tidak bisa kami perlakukan sebagai perbaikan karena prosesnya seperti yang kami ceritakan tadi itu. Begitu. Ya, jadi (...)

180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang merespons dari KPU ada yang Nomor 123-12-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019, nih. Untuk Jeni, ada?

181. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019:

Ada, Yang Mulia.

182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Si Jeni. Ada?

183. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019:

Ya. Dari PAN, kami.

184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi begini, karena sudah tadi terlanjur terbaca ... dibaca, ya kan? Nanti semua diserahkan kepada responnya KPU, Bawaslu, dan Pihak

Terkait. Pihak Terkait ada yang hadir enggak untuk Perkara Nomor 123-12-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019?

185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019:

Hadir, Yang Mulia.

186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hadir? Terserah ya. Tapi prinsip hukum acara Mahkamah itu sudah strict, artinya pada Sidang Pendahuluan itu tidak ada lagi perbaikan-perbaikan yang sifatnya substansial seperti yang dibacakan Pemohon tadi.

187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019:

Baik.

188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan direspon! Dan nanti Mahkamah yang memutuskan barangkali begitu Pak Ketua nanti, ya karena (...)

189. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, kami harus menyampaikan ... kami harus menyampaikan hal itu tidak bisa kami terima. Berbeda halnya kalau perbaikan itu sudah kami terima di dalam permohonan. Karena itu kan berarti tidak diterima oleh Termohon, kan? Tidak juga diterima oleh Pihak Terkait. Jadi, apa yang mau direaksi ketika muncul tiba-tiba di sini. Nah, kalau misalnya ada per ... permohonan, kemudian ada perbaikan permohonan, dan kemudian dua-duanya itu disertakan. Nah, itu kan fair buat Termohon dan Pihak Terkait yang akan memberikan reaksi kepada permohonan. Tapi ini Saudara muncul tiba-tiba di ruangan ini dengan permohonan yang berbeda, yang ada di dalam registrasi kami. Nah, itu yang tidak bisa. Nah, sehingga kami harus memperlakukan nanti berbeda dengan permohonan ... memperlakukan sama kalau terjadi kasus seperti ini dan berbeda dengan permohonan-permohonan yang permohonannya diajukan, perbaikannya diajukan, sehingga diberikan tanggapan juga oleh Termohon dan Pihak Terkait. Begitu Saudara, ya, Pak Jeni. Silakan duduk!

Baik. Demikian. Jadi nanti itu, sekali lagi Termohon dan Pihak Terkait untuk memperhatikan hal ini. Apapun nanti tanggapan Saudara terhadap permohonan yang ini, itu adalah hak Saudara. Terakhir kami yang akan mempertimbangkan. Begitu, ya?

190. KUASA HUKUM TERMOHON PAN, GOLKAR, BERKARYA: MUH. ALFARISI

Izin, Yang Mulia.

191. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa?

192. KUASA HUKUM TERMOHON PAN, GOLKAR, BERKARYA: MUH. ALFARISI

Apakah tadi yang disampaikan oleh Saudara Pemohon itu apakah akan diserahkan ke Mahkamah atau tidak?

193. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak bisa kami terima. Kalau yang itu tidak bisa (...)

194. KUASA HUKUM TERMOHON PAN, GOLKAR, BERKARYA: MUH. ALFARISI

Tidak bisa diterima.

195. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena itu tidak ada di ... diserahkan kepada kami sebelumnya, tiba-tiba muncul di sini. Makanya tadi saya katakan, berbeda dengan kalau permohonan yang awal disertakan, perbaikannya juga disertakan, dan kemudian misalnya di dalam persidangan ini dua-duanya dibacakan. Itu kan lain soal. Dokumennya semua ada pada kami. Tapi ini muncul tiba-tiba, begitu, yang ... yang tidak bisa kami terima.

Nah, itu terserah kepada Saudara, bagaimana Saudara menanggapi itu, ya. Nanti kalau kami ... ini ... kami kan jadi mengarahkan, masa kami jadi Termohon. Mahkamah jadi ... terserah Saudara dan Pihak Terkait untuk menanggapi kejadian ini. Begitu. Dan apalagi juga ... tadi juga ternyata tidak ada juga kuasa untuk yang ... apa ... secara khusus diberikan kepada kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional. Jadi, demikian.

Baik. Untuk PAN?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MARTINA

Mohon izin, Yang Mulia.

197. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari mana?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MARTINA

Dari PAN untuk Dapil VIII Jabar.

199. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He eh. Masih berlanjut?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MARTINA

Masih.

201. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, yang tadi Pak ... anu ... ya, Dapil 15. Yang tadi Pak siapa tadi? Bapak bacakan tadi untuk ... enggak yang dibaca sama Bapak tadi itu. He eh. Oh, itu yang Cimahi, kan? Jadi, ini beda-beda? Kuasanya juga beda-beda, ya?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MARTINA

Berbeda Kuasanya, Yang Mulia.

203. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, tadi karena tadi ... tidak diperkenalkan Kuasanya per dapil, oke. Silakan, Ibu! Ya.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MARTINA

Terima kasih, Yang Mulia, untuk waktunya. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Umum

Partai Amanat Nasional, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional bertindak untuk dengan atas nama Partai Amanat Nasional peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Provinsi Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Dapil Jabat 8 dan bertindak juga untuk dan atas nama Saudara Andri W. Kusuma, S.H., M.H. Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar VIII.

Langsung pada pokok permohonan, Yang Mulia. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR Republik Indonesia pemilihan Jabar VIII adalah sebagai berikut.

Untuk Partai Amanat Nasional, menurut Pemohon perolehan suaranya adalah=122.662. sedangkan menurut Termohon adalah=99.190, sehingga ada selisih atau hilang sekitar=23.472. Bahwa mengenai selisih suara di atas Pemohon mendalilkan sebagaimana di dalam permohonan Pemohon. Selisih suara tersebut di atas disebabkan karena adanya pengurangan dan penggelembungan suara yang diberikan ke partai lain oleh Termohon, salah satunya adalah Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahwa selain adanya pengurangan suara Pemohon juga terjadi pengurangan terhadap Caleg Andri Wijaya Kusuma di 31 kecamatan di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Dapil Jabar VIII sejumlah=8.497.

Bahwa pengurangan dan penggelembungan suara hampir terjadi di seluruh partai politik di 30 kecamatan di Dapil Jabar VIII, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon terbukti Termohon dari awal telah mempersiapkan Formulir C-1 kosong yang ditandatangani oleh para penyelenggara pem ... pemungutan suara dan para saksi partai politik.

Langsung pada Petitem, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pada sebagaimana terlampir dalam permohonan Pemohon. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan Jawa Barat VIII.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di Dapil Jabar VIII sebagai berikut.

Partai Amanat Nasional sebesar=122.662. Kemudian untuk Caleg Andri Wijaya Kusuma sebesar=36.979 suara.

4. Mewajibkan Termohon untuk membuka C-1 Plano DPR, DAA-1 Plano DPR, DA-1 Plano DPR, dan rekapitulasi perhitungan suara ulang berdasarkan C-1 Plano DPR, DAA-1 Plano DPR, dan DA-1 Plano DPR.
5. Menetapkan kursi Pemohon untuk DPR di daerah pemilihan Jawa Barat VIII, yakni kursi urutan kesembilan diberikan kepada Caleg Andri Wijaya Kusuma, S.H., M.H.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan keputusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, kuasa hukum Pemohon, Martinus F. Hemo, Martina, S.H., M.H., Hendra Ferdiansyah, S.H. Terima kasih.

205. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Saudara ada renvoi? Salah ketik atau sebagainya?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MARTINA

Tidak ada.

207. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada? Baik, terima kasih. Masih ada dari Partai Amanat Nasional yang dapil ... yang permohonan untuk dapil tertentu yang belum dibacakan? Menurut catatan kami sudah memang.

Baik, kalau begitu (...)

208. KUASA HUKUM TERMOHON PAN, GOLKAR, BERKARYA: MUH. ALFARISI

Izin, Yang Mulia.

209. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari?

210. KUASA HUKUM TERMOHON PAN, GOLKAR, BERKARYA: MUH. ALFARISI

Dari Termohon, Yang Mulia.

211. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Termohon, bagaimana?

212. KUASA HUKUM TERMOHON PAN, GOLKAR, BERKARYA: MUH. ALFARISI

Di catatan kami untuk permohonan yang tadi Dapil VIII itu, Yang Mulia?

213. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana?

214. KUASA HUKUM TERMOHON PAN, GOLKAR, BERKARYA: MUH. ALFARISI

Antara permohonan dengan apa yang dibacakan berbeda, Yang Mulia. Dalam permohonan yang kami terima, permohonan yang diregistrasi suara Partai Amanat Nasional yang diminta itu=99.190 suara, bukan=120.000 sekian, ya. Terus untuk Caleg Andri Wijaya Kusuma itu yang diminta=32.482, bukan 36.000 sekian, Yang Mulia.

Untuk Partai Amanat Nasional, Yang Mulia, dalam permohonan yang kami terima=99.190. Untuk Caleg atas nama Adri W. Kusuma=32.482. Ini berbeda dengan yang dibacakan oleh Pemohon.

Kemudian, untuk Partai Amanat Nasional yang lain, masih ada permohonan dalam catatan kami itu atas nama James Martin. Nah, apakah ini ditarik? Kalau memang sudah tidak dibacakan atau apa (...)

215. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kalau memang tidak dibacakan di dalam persidangan ya, itu terserah Termohon nanti menanggapi bagaimana. Berarti kan, tidak ada kejelasan mengenai permohonan itu, kan?

216. KUASA HUKUM TERMOHON PAN, GOLKAR, BERKARYA: MUH. ALFARISI

Betul.

217. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu kemudian yang kedua, mengenai soal yang Saudara tanyakan itu, nah, itu memang ada per ... ada ... ada ... ada ... ada persoalan. Di dalam catatan di Mahkamah yang di ... diucapkan tadi dalam

persidangan itu, itu terlambat 41 menit dengan waktunya, dalam catatannya. Nanti kami sampaikan buktinya di dalam pengiriman, di dalam anunya. Nah, nanti sekarang terserah kepada Saudara Termohon, apakah Saudara akan mengajukan eksepsi terhadap itu atau bagaimana, itu terserah. Demikian juga Pihak Terkait karena di ... di Mahkamah ini kan, tidak bisa yang hadir dibohongi karena begitu anu kan ... begitu keluar APBL, APBL dikirimkan lewat ini, tanggal pengiriman sama jam penerimaan itu ada. Bahwa itu dibuka atau tidak, itu kan, bukan ... bukan Mahkamah yang mempunyai ini, ya. Itu soal yang lain.

Nah, nanti terserah kepada Pemohon dalam ... kepada Termohon dalam hal ini dan Pihak Terkait untuk menanggapi keadaan seperti itu. Terakhir, Mahkamah yang akan me ... mempunyai sikap. Tetapi kan, giliran Saudara dan Pihak Terkait belum tiba untuk menyampaikan itu. Nanti silakan disampaikan dalam tanggapan Saudara, begitu. Termasuk tadi yang Saudara tanyakan. Kalau menurut catatan Saudara ada satu lagi yang belum ada ya, itu Saudaraanggapi juga, ya?

218. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini yang Pemohonnya perseorangan Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar XI, ya? Atas nama James Martin, Termohon? Itu yang dimaksud?

219. KUASA HUKUM TERMOHON PAN, GOLKAR, BERKARYA: MUH. ALFARISI

Betul. Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya, Dapil Jabar XI.

220. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tapi dari Pemohon tadi tidak disinggung-singgung, ya? Ya? Ya, apa?

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA

Belum hadir sampai saat ini.

222. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara termasuk kuasa itu, bukan?

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA

Tidak.

224. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, tidak termasuk?

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA

Tidak.

226. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, kalau tidak hadir berarti Mahkamah nanti yang akan mempertimbangkan tersendiri soal itu. Dan silakan kepada Termohon dan Pihak Terkait untuk menanggapi itu karena (...)

227. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kuasa Pemohon yang di sini, Devan Triwibowo. Tidak hadir?

228. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak hadir.

229. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tidak ada.

230. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, begitu ya, Termohon ya? Pihak Terkait, ya? Supaya fair.

Baik dengan demikian, maka dari PAN berarti sudah selesai. Alat bukti yang kami terima, pertama untuk ... saya dari ini dulu, dari yang Pak Jeni Jayusman dulu. Walaupun permohonannya 1 lembar, tetapi di dalam buktinya di sini, ada ... ya, yang menurut catatan pada kami, yang sudah diverifikasi oleh Kepaniteraan itu Bukti P-1 sampai dengan P-161, betul ya? Betul. Jadi, ini ya buktinya kita sahkan walaupun permohonan Saudara itu.

KETUK PALU 1X

Kemudian, yang berikutnya dari PAN ada ini yang diberikan kuasa tadi. Yang untuk permohonan yang Dapil VIII, tadi yang Bapak bacakan Dapil VIII, ya?

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA

Saya bacakan Cimahi, Pak.

232. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang Cimahi?

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA

Ya.

234. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sori. Oke, yang Cimahi berarti yang P-1 sampai P-8 itu bukti yang Saudara serahkan, betul?

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YUDHA INDRAPRAJA

Betul, Yang Mulia.

236. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, itu disahkan.

KETUK PALU 1X

Nah, yang Dapil VIII ini yang Dapil Jabar ... DPR RI Dapil Jabar VIII ini yang tidak ... tidak hadir itu ya? Pak Devan itu? Jadi, walaupun kami menerima bukti ini, karena yang bersangkutan tidak hadir, tidak kami sahkan.

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MARTINA

Hadir, Yang Mulia. Untuk Dapil VIII.

238. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh yang ... sori, sori, untuk Dapil VIII, ya. Maaf, maaf, saya salah membaca ininya. Yang ibu, ibu siapa tadi? Martina, ya? Ibu yang di Dapil VIII itu ... Dapil Jabar VIII, ya.

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MARTINA

Betul.

240. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya betul. Ini bukti yang kami terima adalah dari P-1 sampai dengan P-240, ya?

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019: MARTINA

Betul.

242. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul ya. Itu sudah kami verifikasi disahkan.

KETUK PALU 1X

Nah, sedangkan yang 1 lagi, yang James Martin itu juga memang ternyata tidak ada alat buktinya dan orangnya juga tidak datang. Nanti itu Mahkamah akan mempertimbangkan tersendiri mengenai keberadaannya. Terima kasih untuk PAN. Sekarang kita lanjutkan dengan Partai Demokrat. Sama ya seperti tadi.

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa permohonan. Untuk permohonan pertama, saya akan menyampaikannya, yaitu dari Dapil IX atas nama Wiwin Winingsih, Nomor Urut 2. Ya ... pada permohonan ini, izin kami ada merenvoi atau menambahkan sedikit, Yang Mulia.

244. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Menambahkan sedikit apa substansial atau tidak?

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Tidak substansial, Yang Mulia. Artinya, di poin pertama itu kami tambahkan tentang DCT bahwa Pemohon ... Pemohon sudah masuk terdaftar di DCT.

246. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bahwa saudara itu adalah?

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Caleg di Dapil IX.

248. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, kemudian yang nomor 2-nya, kami tambahkan mengenai DC-1 mengenai perolehan suara di DC-1 dan (...)

250. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu di permohonan Saudara halaman berapa itu?

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ini yang kami tambahkan, Yang Mulia. Nomor 1 dan nomor 2, kami tambahkan.

252. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu di ... di mana tempatnya itu?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Di halaman pertama, Yang Mulia.

254. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di halaman pertama?

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

256. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di bagian apanya?

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Di bagian Pokok Permohonan, Yang Mulia.

258. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagian pokok permohonan, kedudukan hukum, legal standing, bagian kewenangan, tidak ada perbaikan?

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Tidak ada.

260. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada? Itu di pokok permohonan?

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

262. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Hanya melengkapi itu?

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Menambahkan, ya.

264. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kemudian, ada juga susunannya sedikit kami ubah. Yang tadinya di nomor di bawah supaya ada urutan yang bagus (...)

266. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang mana yang susunan Saudara ubah di permohonan itu yang mana?

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi, tadinya nomornya itu di nomor setelah urutan tentang perolehan suara.

268. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kemudian, kami me ... tadinya setelah urutan permohonan ... ini suara, kemudian kami naikkan ke nomor di atasnya, Yang Mulia.

270. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di atas itu?

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

272. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tanpa mengubah substansi?

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Tidak.

274. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Hanya perbaikan tempat?

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Hanya supaya urutannya lebih bagus saja.

276. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pemindahan tempat saja?

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

278. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke.

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kemudian, ada di petitum kami menambahkan sedikit, Yang Mulia.

280. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa tambahan petitumnya?

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kami menambahkan mengenai perolehan suara yang kami sampaikan ... yang sudah kami sampaikan (...)

282. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu sudah substansi.

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Nggak. Di ... di ... di permohonan di posita sudah kami sampaikan. Cuma di petitum kurang kami sampaikan, Yang Mulia.

284. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di posita (...)

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi untuk menetapkan (...)

286. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di posita sudah ada?

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Sudah ada, Yang Mulia.

288. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di posita sudah ada?

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Sudah.

290. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi di petitum tertinggal?

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya. Begitu, Yang Mulia.

292. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kami terima itu, tapi nanti kami serahkan juga kepada Termohon dan Pihak Terkait untuk menanggapi itu.

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Siap, Yang Mulia.

294. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kami terima itu, ya?

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

296. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena kami menganggap itu adalah bagian dari posita Saudara yang tidak dicantumkan di situ. Tapi agar fair, maka kepada Termohon dan Pihak Terkait kami juga persilakan untuk memberikan tanggapannya terhadap soal itu. Jadi, silakan Saudara bacakan pokok-pokok permohonan yang sudah direnvoi tadi. Ya?

Kalau ada yang di luar renvoi yang Saudara sampaikan itu ada tambahan substantif ... itu ... Mahkamah akan menganggapnya sebagai tidak ada. Ya?

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

298. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan!

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Baik, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan pokok-pokok permohonan kami ini.

Pertama adalah menurut per ... menurut Termohon bahwa suara dari kami adalah=34.378. Kemudian, suara dari Caleg Nomor 1, internal, Yang Mulia, itu=34.819. Jadi, ada selisih=441 suara, Yang Mulia. Menurut kami, berdasarkan fakta dan temuan-temuan kami di lapangan bahwa tidak demikian ... ininya ... suaranya. Menurut kami, suara yang benar itu adalah bahwa suara kami, yaitu Caleg Nomor Urut 2=34.375 suara. Sementara Caleg Nomor Urut 1=29.106 suara. Jadi, di sini terdapat selisih suara sebanyak=5.269 suara dan sesungguhnya, sebetulnya ada ... ada tambahan lagi yang totalnya sebetulnya=5.703 suara, yang mana suara-suara tersebut adalah penggelembungan suara-suara di bawahnya. Jadi, artinya apa yang kami sampaikan ini adalah bahwa suara caleg nomor urut ... Nomor Urut 1 itu menggelembung, kemudian itu diambil dari ... suara-suara dari ... di samping menggelembung itu kemudian diambil dari suara partai. Kemudian, diambil juga dari suara caleg di bawahnya. Itu, Yang Mulia, yang totalnya un ... dari suara yang bersangkutan itu=5.713 suara, Yang Mulia.

300. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Caleg Nomor 1 yang Saudara maksud itu siapa?

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Namanya H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos., Yang Mulia.

302. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Jadi, itu yang Saudara maksud ada persoalan dengan suaranya, ya?

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya. Jadi, mengenai pergerakan suara ini hanya ada di 1 Kecamatan Tambun Selatan, khususnya di 6 desa, Yang Mulia. Desanya adalah Desa Mangunjaya, Desa Jatimulya, Desa Mekarsari, Desa Setiamekar, kemudian Desa Tridaya Sakti, dan Desa Sumber Jaya, Yang Mulia.

304. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tridaya Sakti. Kecamatan Tambun Selatan semuanya itu, ya?

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.

306. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu yang menurut Saudara ada persoalan, ya?

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

308. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Oke.

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi, hanya penggelembungannya itu atau pergerakan suara itu dari Caleg Nomor Urut 1 itu hanya di 1 kecamatan, khususnya 6 desa, Yang Mulia.

310. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Itu yang menurut Saudara bermasalah?

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Betul, Yang Mulia, dan kami sudah menyampaikannya, membuktikan ... menyampaikan bukti-bukti tersebut mulai dari bukti P-1 sampai P-27, Yang Mulia.

312. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Nanti kita akan periksa itu.

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

314. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi ... terus Petitem Saudara apa lalu?

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Akan disampaikan oleh rekan saya, Deny.

316. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan!

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENY FELANO

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

318. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan!

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENY FELANO

Baik. Terima kasih. Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh rekan kami tersebut di atas (...)

320. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar. Bapak siapa yang baru datang? Oh, tadi sudah datang? Oh, ya, silakan! Nanti kalau ini minta izin dulu, ya kalau keluar?

Ya. Silakan, silakan!

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENY FELANO

Izin melanjutkan kembali, Yang Mulia. Berdasarkan uraian yang disampaikan rekan kami tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Pada Petitum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (...)

322. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

2019.

323. KUASA HUKUM PEMOHON: DENY FELANO

2019, mohon maaf, Yang Mulia. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional tertanggal 21 Mei 2019 untuk Pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota sepanjang Desa Mangunjaya, Sumber Jaya, Jatimulya, Mekarsari, Setiamekar, Tridaya Sakti pada Kecamatan Tambun Selatan.

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan 5.713 penggelembungan suara dan menyatakan perolehan suara Partai Demokrat yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

Yang pertama, perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1, atas nama H.M. Achdar Sudrajat di Kecamatan Tambun Selatan menjadi=6.339 suara dengan rincian sebagai berikut. Dengan total:

- H.M Achdar Sudrajat=6.339 suara.
- Wiwin Winingsih=2.807 suara.
- M. Rojak=910 suara.
- H. Abai Subarna=569 Suara.
- Ummi Elmasina=382 suara.

- H. Basan Basri=1.867 suara.
- Maesa Belvirona=454 suara.

Selanjutnya, perolehan suara caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Achdar Sudrajat pada DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX Jabar menjadi=29.106 suara. Dan Nomor Urut Caleg Nomor 2, Wiwin Winingsih=34.375 suara. M. Rojak=2.227 suara, H. Abai Subarna=11.532 suara. Ummi Elmasina=2.377. H. Hasan Basri=11.502 suara. Maesa Belvirona=2.443 suara.

4. Atau memerintakan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang Partai Demokrat pada Dapil Jabar IX DPRD Provinsi Jawa Barat di TPS Desa Mangunjaya, Desa Sumber Jaya, Desa Jatimulya, Mekarsari, Setiamekar, Tridaya Sakti pada Kecamatan Tambun Selatan.
5. Memerintakan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Hormat kami selaku Kuasa Hukum ditandatangani oleh Mehbob, S.H., M.H, CN, Yandri Sudarso, S.H., M.H, Dormauli Silalahi, S.H., M.H, Deny Felano S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

324. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu ... itu Saudara, ya. Termohon khususnya dan Pihak Terkait itu adalah tambahan yang tadi disampaikan yang dikatakan ada di dalam posita. Terserah kepada nanti kepada Saudara untuk menyampaikan itu. Karena di dalam perbaikan itu tidak kami terima dan baru dilakukan hari ini. Tolong nanti renvoi yang disampaikan itu diambil, ya. Petugas, tolong diambil kepada ini! Yang renvoi yang tadi dibacakan itu. Ada?

Ya, itu, silakan. Masih ada dari Partai Demokrat?

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Masih, Yang Mulia.

326. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekarang untuk yang dapil?

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Dapil Jawa Barat untuk Dapil III.

328. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dapil III? Ya. Silakan.

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Ya. Terima kasih, Yang Mulia untuk kesempatannya. Kami dari Partai Demokrat selaku Kuasa Hukum dari Pemohon ini tentang Dapil III Nomor Urut 6 nama Calegnya Titin Sulastini. Mengenai tentang hal ini saya langsung menyampaikan pokoknya saja Pak Ketua. Di DA-1 Pemohon tersebut suaranya 821 itu di kecamatan, itu Kecamatan Tukdana, di DB-1 di pleno KPU menjadi berkurang menjadi 121, sehingga minus 700. Jika itu tidak berkurang atau minus, maka yang terpilih itu adalah caleg Nomor Urut 6, Titin Sulastini. Ini telah kami uraikan dengan sangat bagus di dalam permohonan dan perbaikan.

Dengan demikian, kami langsung membaca tentang petitumnya saja.

Petitumnya.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Di daerah Pemilihan Indramayu Nomor 3 Model DB-1 DPRD Kabupaten/kota Bukti P-2.
3. Memerintahkan Termohonan untuk melakukan perubahan terhadap sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Di Daerah Pemilihan Indramayu III, Model DB-1 DPRD Kabupaten Kota, Bukti P-2 dengan berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dari setiap desa kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tukdana, Daerah Pemilihan Indramayu III, Model DA-1 DPRD Kabupaten Kota yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Tukdana Kabupaten Indramayu Bukti P-3 yang rincian hasil perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut.

Partai Demokrat, perolehan suaranya=89.

1. Caleg Nomor 1, Sandi Jaya Pasa=74.
2. Caleg H.K. Kamud, S.H.=132.

3. Kunaini Suhartini, S.T.=134.

4. Dapan=3.

5. Wahyu Kurniawan=14.

6. Titin Sulastini=821.

7. Qurrotul Aini=47 suara.

8. Drs. H. Ibrahim=115 suara.

9. Rofiqoh=13 suara.

Jumlah seluruhnya=1.442.

Apabila Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ini khusus untuk Dapil III Nomor 6, Pak, calegnya.

330. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Atas nama Titin Sulastini.

332. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Titin Sulastini.

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Ya, itu (...)

334. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang dianukan Saudara itu tadi menurut Saudara itu suaranya=821 itu, ya?

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Ya. Itu adanya di Kecamatan Tukdana di DA-1 tertulis=821. Setelah di rekapitulasi pleno KPU menjadi minus 121 jadinya tertulis, sehingga berkurang 700 suara.

336. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu sudah tadi, kan (...)

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Ya, itu yang kami sampaikan, Yang Mulia.

338. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Baik. Untuk selanjutnya, Yang Mulia (...)

340. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang sekarang?

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Ini ada lagi Dapil I Nomor Urut 1 atas nama Hj. Titi H. Noorbandah, itu di Kuningan, Yang Mulia.

342. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ibu Hj. Titi H. Noorbandah. Ya, silakan!

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Ya.

344. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa dalilnya? Apa di sini?

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Ya. Kami mau sampaikan di rekapitulasi hasil pleno KPU DB-2 ... DB-1 Hj. Titi Noorbandah tersebut=4.584. Caleg Nomor 2=4.629. Seharusnya sesuai dengan bukti yang kami uraikan di dalam

permohonan kami, Caleg Nomor 1 Hj. Titi itu=4.616. Caleg Nomor 2=4.595. Jadi, di hasil rekapitulasi KPU di DB-1, selisih antara Caleg Nomor 2 dengan Caleg Nomor 1=45. Padahal seharusnya kalau kita lihat dengan bukti-bukti yang kami ajukan, maka Caleg Nomor 1 lebih tinggi=4.616. Sedangkan Caleg Nomor 2=4.595. Ada selisih 12. Jika yang kami mohonkan ini dengan sesuai bukti-bukti kami dan nanti dalam persidangan diperiksa, maka harusnya Caleg Nomor 1, Hj. Titi H. Noorbandah itu yang menjadi terpilih. Itu yang dapat kami sampaikan dan selanjutnya kami bacakan tentang petitumnya.

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Bahwa dengan adanya kecurangan sebagaimana dimaksud di atas, maka kami Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keputusan sebagai berikut.

Petitum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Termohon untuk penghitungan suara di seluruh TPS di Desa Awirarangan, Desa Cipedes, Kelurahan Winduhaji, Desa Rambatan, Desa Winduherang, Desa Cijoho.

Terima kasih, Yang Mulia.

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Petitumnya 2.

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Dua petitum, Yang Mulia.

349. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, coba dibacakan lagi. Kok, agak lain dengan yang ada pada kami.

350. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang di kita, ya. Itu penghitungan suara.

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Betul.

352. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Penghitungan suara ulang atau penghitungan suara saja?

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Penghitungan ... penghitungan suara ... penghitungan suara ulang.

354. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Desa Awirarangan, ya?

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ya.

356. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Desa Cipedes, ya?

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Betul.

358. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sesudah itu Kelurahan Winduhaji?

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Betul.

360. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Desa Rambatan?

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Betul, Yang Mulia.

362. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Desa Winduherang.

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Betul, Yang Mulia.

364. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Desa Cijoho?

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Ya.

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Betul, Yang Mulia.

367. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tadi, sama ini?

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Sama, Yang Mulia.

369. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, di berapa TPS ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya?

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

6.

371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ya, 6 desa.

372. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, dia tidak beda dengan yang di permohonan yang sudah ada ini. Apa petitem yang angka 2, ya?

373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Sama. Sama, Yang Mulia.

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Sama, Yang Mulia.

375. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah?

376. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah.

377. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi tidak ada perubahan?

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Tidak ada.

379. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak? Baik. Apa masih ada?

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Cukup, Yang Mulia.

381. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari Demokrat? Renvoi juga sudah tidak ada, ya? Kan tadi sudah disampaikan. Baik, kalau begitu. Ini ada catatan kami begini, ada satu ... apa ... ya, ada permohonan 2 kali dimasukkan yang oleh Kuasa Hukum dijanjikan akan ditarik. Jadi, yang mana yang mau ditarik itu? Dan itu sudah dihubungi melalui juru panggil yang mengatakan ada permohonan akan ditarik. Jadi, yang mana yang mau ditarik itu? Itu yang kami terima tanggal 23 itu.

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Yang Mulia. Yang per hari ini memang tadi sengaja kami tidak sampaikan karena memang sampai detik terakhir hasil komunikasi kami tadi malam bahwa yang bersangkutan menarik permohonannya, Yang Mulia.

383. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, coba tegaskan dahulu. Yang menarik permohonan itu siapa? Supaya ini (...)

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Atas nama Ricky Subagja Caleg DPR RI Nomor Urut (...)

385. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Nomor Urut 2, Yang Mulia.

387. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk Dapil?

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Untuk Dapil I Jabar, Yang Mulia.

389. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dapil I Jabar. Ya. Jadi itu minta ditarik?

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.

391. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Termohon dan Pihak Terkait itu ada pernyataan penarikan. Jadi, sudah dinyatakan dalam sidang jadi itu sah ditarik, ya. Sehingga nanti tidak ada persoalan lagi mengenai soal itu.

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Terima kasih, Yang Mulia.

393. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Silakan! Kalau demikian maka sekarang terhadap pengesahan (...)

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Yang Mulia?

395. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ada tambahan. Ada satu lagi, Yang Mulia, yang ditarik juga adalah atas nama Aditya Wiradi Putra, Dapil II Nomor Urut 2.

397. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Itu juga karena tadi saya juga ... karena saya, makanya saya tanya masih ada lagi? Ternyata tidak. Berarti itu juga termasuk yang di ... ditarik, ya?

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ya.

399. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena sampai sekarang ada 2. Termohon mohon diperhatikan itu, ya ada 2, Pihak Terkait juga. Itu 2 yang ditarik permohonannya. Sebentar dahulu Pak ... ini ... Saudara Pihak Terkait dari mana? Tadi baru datang. Tolong perkenalkan diri dahulu! Ya ber ... tolong diberikan dahulu mic-nya.

400. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Ya. Assalamualaikum wr. wb., salfe, shalom, om shanti shanti shanti om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya mewakili Partai Demokrat dari Dapil Jabar IX untuk DPRD provinsi atas nama Saudara H. Muhammad Achdar Sudrajat, S.Sos.

401. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu sebagai Pihak Terkait, ya?

402. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Siap.

403. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

404. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Ini persoalan internal.

405. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Silakan duduk nanti ... anu ... jadi yang (...)

406. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Mohon izin, Yang Mulia.

407. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa itu? Ya. Ya sudah, silakan duduk! Nanti kalau sidang berikutnya jangan terlambat lagi Pak, ya?

408. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Jadi, memang saya sejak Pukul 07.30 WIB sudah di lokasi MK, tapi diarahkan di bawah tadi.

409. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi?

410. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Pada saat persidangan, kemudian saya membaca ternyata kita ... di apa namanya (...)

411. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di lantai ini?

412. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Ya. Panel III. Jadi saya ...

413. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Alamat ... untung bukan alamat palsu, ya.

414. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Siap.

415. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih.

416. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Jadi, ada misinformasi. Terima kasih.

417. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, miskomunikasi. Artinya, sudah ada niat baik, tapi ya salah ... salah kamar begitulah.

418. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Siap, Yang Mulia.

419. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Untuk Demokrat, ini ... untuk yang bukti sudah kami terima sesuai dengan dapilnya, yang bukti untuk DPRD Provinsi Dapil Jabar IX, itu Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-27, kemudian P14-1 sampai P14-27, betul? Betul?

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Betul, Yang Mulia.

421. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Ini sudah kami verifikasi dan kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk permohonan yang atas nama Ibu Titin Sulastini ini, itu Saudara yang menurut verifikasi kami Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-3?

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Benar, Yang Mulia.

423. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Itu kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pemohon atas nama Hj. Titi H. Noorbandah, Saudara mengajukan alat bukti yang sudah kami verifikasi, P-1 sampai dengan P-26, benar?

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAH

Benar, Yang Mulia.

425. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Sah.

KETUK PALU 1X

Baik. Dengan demikian alat bukti dari ... untuk Perkara dari Partai Demokrat sudah semuanya kita sahkan. Dan tadi ada 2 yang dinyatakan ditarik dalam persidangan dan dengan demikian itu sudah dianggap tidak ... tidak menjadi bagian lagi dari permohonan dari Partai Demokrat. Demikian. Baik. Selanjutnya, Partai Persatuan Pembangunan, silakan! Siapa yang jadi juru bicara?

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita semua. Dari Partai Pembangunan dalam perkara ini, Yang Mulia, kami akan

menyampaikan empat permohonan, yaitu satu, Jabar III untuk DPR RI. Yang kedua, Kota Sukabumi untuk DPRD. Lalu kemudian yang ketiga, Kabupaten Bekasi untuk DPRD. Lalu kemudian yang keempat adalah Kota Bekasi untuk DPRD.

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Legal standing dianggap dibacakan.

Tenggang waktu. Bahwa berdasarkan Pasal 704 ayat ti ... ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung dan seterusnya ... Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dikasih tenggang waktu 3x4 ... 3x24 jam. Lalu kemudian, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional ke ... ke Mahkamah Agung ... eh ... ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.24 WIB. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sehubungan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk selanjutnya, pokok permohonan Dapil III Jabas ... Jabar, saya serahkan kepada rekan saya.

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP RUDIYANA

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Dapil Jawa Barat III atas nama Pemohon Bapak H. Joko Purwanto bahwa berdasarkan hasil persandingan perolehan suara par ... partai politik menurut Termohon dan Pemohon terdapat selisih suara Pemohon, yaitu=12.020 suara, sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi kedelapan DPR RI dari Dapil Jabar III.

Bahwa Pemohon sudah menguraikan jumlah tersebut tersebar di 13 kecamatan, 131 desa, dan 2.124 TPS yang dilengkapi dengan bukti salinan C-1. Bahwa menurut Termohon 13 kecamatan tersebut adalah Cikalongkulon, Pagelaran, Agrabinta, Cempakamulya, Sindangbarang, Sukaluyu, Cibeber, Haurwangi, Takokak, Cibinong, Cidaun, Mande, dan Karangtengah. Adapun Pemohon sudah mengajukan keberatan pada saat rapat pleno di KPU kabupaten dengan dibuktikan pada Form DB-2 dan juga pada saat rapat rekapitulasi pleno di Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan dengan DC-2.

Selain itu juga, Pemohon juga sudah mengajukan laporan kepada Bawaslu Jawa Barat dan Bawaslu Jawa Barat juga sudah membuat putusan yang juga sudah disampaikan dalam bukti yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Cianjur secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dan dijatuhkan peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Pada saat ini juga Termohon sedang menjalani proses DKPP. Bukti pelaporan ke DKPP juga kami sudah sampaikan di dalam pembuktian. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan kami.

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Terima kasih, Yang Mulia. Saya tambahkan untuk Dapil III Jawa Barat DPR RI dalam perkara tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-2.227 dan kami sudah serahkan semua. Ada tanda terimanya dan sudah dinasegel dan perselisihan adalah 12.020, dimana P-3 ditetapkan 82.932 suara, seharusnya oleh Termohon ... seharusnya Pemohon memperoleh 94.952, ya. Jadi, selisih 12.000 (...)

429. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya interupsi sebentar (...)

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Baik, Yang Mulia.

431. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tadi Bukti P-1 sampai P-2.227?

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, 2.279, Yang Mulia.

433. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, di sini begitu tadi disebut 2.227 ya.

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

2.279.

435. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, yang betul 2.279 itu, ya?

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

437. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tadi disebut 2.227 tadi. Ya. Jadi, yang betul 2.279.

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, saya ulangi. Yang benar adalah ... yang betul adalah 2.279 alat bukti tertulis, yang kami ajukan dari 13 kecamatan, 131 desa, 2.120 C-1. Sama bukti-bukti yang total adalah 2.279 alat bukti tertulis, Yang Mulia. Nanti juga akan kami ajukan saksi.

439. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Langsung ke poin ininya saja. Petitumnya yang Saudara minta ini apa? itu saja. Kalau bukti itu kan sudah kami terima itu, tidak perlu dijelaskan lagi.

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, petitumnya nanti itu gabung dengan semuanya.

441. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan nanti diinikan, ya kalau begitu nanti (...)

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, saya lanjutkan dengan (...)

443. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ke dapil-dapil berikutnya!

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Dapil Kota Sukabumi, Partai Persatuan Pembangunan yang ditetapkan oleh Termohon hanya 2.752 suara. Seharusnya menurut Pemohon adalah 2.766 suara. Nah, setelah dilakukan pembagian angka 3 (suara tidak terdengar jelas), Golkar seharusnya sudah mendapat kursi pertama dengan perolehan suara=36.106. Eh, kami ulangi seharusnya Golkar memperoleh suara=8.264 suara, lalu kemudian kalau dibagi 3, ya. Untuk kursi kedua itu seharusnya dia mendapat=2.730 suara, sehingga terdapat selisih=26 suara saja. Nah, dalam proses pelaksanaan terjadi pengurangan suara Pemohon ... pengurangan suara per ... Pemohon itu terjadi di TPS 21, Kelurahan Karang Tengah, seharusnya Pemohon memperoleh=28 suara, berdasarkan Model C-1 DPRD. Namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Gunung Puyuh, Pemohon menjadi=27 suara.

Lalu kemudian, di TPS 25 Kelurahan Karang Tengah, Pemohon memperoleh suara sebanyak=17 suara sebagaimana tertuang di dalam C-1 DPRD, Bukti P-6. Namun, pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Gunung Puyuh, Pemohon dikurangi 3 suara sehingga suara Pemohon menjadi=14 suara.

Lalu kemudian, di TPS 41 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung penuh ... Puyuh sebanyak=1 suara, seharusnya Pemohon memperoleh=21 suara. Jadi, Pemohon dikurangi 1 suara. Namun, pada saat pleno di PPK suara Pemohon dikurang ... apa menjadi=20 suara. Terus penambahan dan penggelembungan suara Partai Golkar itu di TPS 13 hanya memperoleh=8 suara, namun ditambah digelembungkan menjadi=18 suara.

Lalu kemudian di TPS 12, Kelurahan Waru Doyong penambahan=1 suara. Lalu kemudian di TPS 7, penambahan=7 suara seharusnya Partai Golkar memperoleh=38 suara, berdasarkan C-1, Bukti P-12. Namun, pada saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, suara Golkar menjadi=45. Dan telah terjadi penggelembungan suara juga di TPS 34, lalu kemudian Partai Golkar digelembungkan menjadi=34 suara. Lalu kemudian di TPS 34, penggelembungan suara Partai Golkar sebanyak=10 suara seharusnya Partai Golkar mendapat=21 suara. Namun, pada saat rekap di tingkat PPK Partai Golkar digelembungkan menjadi 31 suara. Dan bukti P-6 di TPS 12, sama, terjadi penggelembung ... penggelembungan juga di anggap dibacakan.

Terus, di TPS 2 juga sama, terjadi penggelembungan juga oleh Partai Golkar, dianggap dibacakan. Terus, TPS 37 terjadi penggelembungan juga oleh Partai Golongan ... Golkar, dianggap dibacakan.

445. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebutkan desanya, Pak, TPS-nya!

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Baik, Yang Mulia. Kalau di TPS 37, di Kelurahan Suka Kaya, Kecamatan Warung Doyong juga terjadi penggelembungan, dianggap dibacakan.

Terus di TPS 12 Kelurahan Gunung Puyuh, juga terjadi penggelembungan oleh Partai Golkar, dianggap dibacakan.

Terus, di TPS 3 Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh juga di ... terjadi penggelembungan, dianggap dibacakan. Bukti P-21.

Nah, terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, Pemohon sudah mengajukan laporan ke Bawaslu. Lalu kemudian oleh Bawaslu di dalam amar putusan menyatakan bahwa khusus untuk Termohon KPU Kota Sukabumi dan PPK Gunung Puyuh, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi. Nah, terhadap putusan tersebut, oleh pihak Bawaslu maupun KPU tidak menindaklanjuti.

Lalu kemudian, untuk Dapil III Kabupaten Bekasi. Nah, untuk Dapil III Kabupaten Bekasi ini, kecurangan yang terjadi adalah berkaitan dengan pengurangan dan juga penggelembungan suara di Kecamatan Tambun Selatan, dimana terjadi di Desa Setia Mekar, TPS 54, Pemohon seharusnya memperoleh=35 suara, tapi direkap DKP menjadi=34 suara. Selisih 1 suara. Terus di TPS 67, Pemohon seharusnya memperoleh=53 suara, tetapi direkap menjadi=52 suara. Selisih 1 suara. Lalu kemudian, di TPS 110 juga terjadi pengurangan suara, dianggap dibacakan. Lalu kemudian di TPS 114 juga terjadi pengurangan suara, dianggap dibacakan. Terus, di TPS 123 juga terjadi pengurangan suara, dianggap dibacakan. Jadi, total pengurangan suara Pemohon di Desa Setia Mekar itu, terdiri dari 5 TPS itu adalah=9 suara.

Lalu kemudian di Desa Mangun Jaya, nah, di Desa Mangun Jaya ini ada 8 TPS yang terjadi pengurangan suara.

1. Di TPS 18. Di Desa Mangun Jaya. TPS 18 Mangun seharusnya memperoleh=9 suara. Tapi di PPK di rekap menjadi=5 suara. Selisih 4 suara.
2. Di TPS 71, Pemohon seharusnya memperoleh 4 suara, direkap di PPK menjadi=2 suara. Selisih 2 suara.

447. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kecamatan apa itu, Pak?

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya?

449. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang Kecamatan apa, itu?

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Tambun Selatan.

451. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tambun Selatan? Oke.

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Tambun Selatan. Jadi ada 4 desa.

Jadi di ... di Mangun Jaya itu di ... terdiri di 8 TPS terjadi pengurangan suara dengan total sebanyak 48 suara. Pengurangan suara yang ... yang seharusnya itu haknya Pemohon.

Terus, pelanggaran berikutnya adalah berkaitan dengan masalah penggelembungan. Itu masih juga terjadi di Kecamatan Tambun Selatan, terdiri dari beberapa desa

1. Desa Setia Dharma. Total penggelembungan sebanyak=49 suara.
2. Desa Setia Mekar. Itu=1 suara
3. Desa Mekar Sari. Total penggelembungan adalah=132 suara.
4. Desa Mangun Jaya. Di TPS 46 dan di TPS 51 terjadi penggelembungan. Di TPS 46=1 suara dan di TPS 51=9 suara.
5. Desa Tridaya Sakti itu terjadi penggelembungan sebanyak=17 suara yang kami sudah uraikan pada pokok permohonan. Lalu kemudian di Desa Jatimulya sebanyak=6 suara. Jadi, total penggelembungan sebesar=215 suara.

Kemudian, untuk persoalan ini juga sudah dilaporkan ke Bawaslu. Nah, sebelum di laporkan Bawaslu juga rekap di tingkat PPK, Pihak Pemohon sudah mengajukan keberatan di Model DA-2 terlampir dalam bukti juga. Lalu kemudian, rekap di tingkat KPU kabupaten juga sudah diajukan keberatan di Model DB-2. Lalu kemudian di ... terhadap pelanggaran tersebut sudah dilaporkan Bawaslu, lalu kemudian putusan Bawaslu Termohon dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi, tetapi tidak

ditindaklanjuti terhadap pelanggaran tersebut tidak ada rekomendasi juga.

Nah lalu kemudian untuk Dapil II Kota Bekasi. Dapil II Kota Bekasi pokok persoalannya adalah pada saat pencoblosan daftar pemilih tetap (...)

453. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dapil berapa itu, Pak?

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Dapil (...)

455. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

2, ya?

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Kota Bekasi, Pak.

457. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke, Dapil 2, ya.

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Pada saat pencoblosan daftar pemilih tetap berdasarkan Model C-7 yang hadir itu tidak sesuai dengan kertas suara yang diberikan oleh Pemohon. Jadi, ... eh, diberikan oleh Termohon. Nah, kertas suara itu melebihi, melebihi dari jumlah pemilih yang hadir pada saat itu. Nah, ketika pada saat terjadi rekap di tingkat PPK baru diketahui oleh Pihak Pemohon, lalu saksi mengajukan keberatan agar supaya rekap yang di tingkat TPS itu harus dibuka kotak suaranya. Karena antara yang hadir melakukan pencoblosan dengan kertas suara yang saat itu lebih banyak daripada kertas suara, sehingga pada saat rekap di tingkat PPK itu terjadi perselisihan suara yang sangat besar untuk Pemohon dan saksi Pemohon sudah mengajukan keberatan agar supaya kotak suara itu dibuka, ya. Namun, oleh petugas PPK menyatakan bahwa tidak ada waktu ruang untuk melaksanakan PSU.

Nah, atas kejadian tersebut Pemohon melaporkan ke Bawaslu, ya. Melaporkan ke Bawaslu karena baru ketahuan itu di tingkat PPK, dibawa di tingkat TPS itu pada saat pencoblosan tidak diketahui (...)

459. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, oke. Itu sudah Saudara jelaskan. Silakan.

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya. Lalu kemudian dilaporkan ke Bawaslu putusan Bawaslu menyatakan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran administrasi dan memerintahkan untuk beberapa TPS itu harus dilakukan penghitungan ulang, ya.

461. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Penghit (...)

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, penghitungan suara ulang di dalam ... di dalam itu.

463. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan pemungutan suara ulang, ya? Penghitungan suara ulang?

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Di dalam putusan Bawaslu itu hanya koreksi saja, Pak, koreksi, dilakukan koreksi (...)

465. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak yang tadi Saudara nyatakan penghitungan suara (...)

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, saya ralat. Dilakukan koreksi terhadap beberapa TPS. Akan tetapi, oleh Bawaslu tidak merekomendasikan ke KPU. Lalu kemudian, Pihak Termohon mengajukan koreksi ke Bawaslu RI. Lalu kemudian, oleh

Bawaslu RI memutuskan bahwa menguatkan menolak permohonan Pemohon dan menguatkan putusan Bawaslu kabupaten yang intinya bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi, ya.

Nah oleh karena itu, terhadap pelanggaran tersebut tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu maupun KPU, maka persoalan ini kita ajukan ke Mahkamah agar supaya untuk TPS-TPS yang 3 kelurahan, antara lain adalah Kelurahan Harapan Baru, Kaliabang Tengah, dan satu lagi yang kami sudah uraikan dalam permohonan kami itu harus dilaksanakan pemungutan suara ulang ... pemungutan suara ulang, sesuai dengan permohonan kami.

467. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini yang Saudara maksud itu di Kelurahan Kaliabang Tengah?

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya. Harapan Baru.

469. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Satu lagi, Harapan Baru atau Harapan Jaya?

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Harapan Jaya, Yang Mulia, maaf Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara.

471. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, yaitu supaya nanti ini. Supaya nanti tidak salah ditanggapannya. Ya, Harapan Jaya yang benar, ya.

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, Harapan Jaya, betul.

473. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang satu lagi yang di Kelurahan Teluk Pucung itu.

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Kula ... Kelurahan Teluk Pucung dan Kaliabang Tengah.

475. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Kaliabang Tengah, Teluk Pucung, kemudian Harapan Jaya.

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, Yang Mulia.

477. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Berarti yang disini sudah benar Saudara salah ngomong tadi, ya.

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, mohon dikoreksi.

479. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Selanjutnya, kami menyampaikan petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, dan seterusnya dianggap dibacakan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat masing-masing sebagai berikut:
 - 3.1. Daerah Pemilihan Jawa Barat Dapil III menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pemohon Dapil III Jawa Barat adalah sebagai berikut: tabel 3.1. Dapil Jawa Barat III untuk

PKB=112.226. Gerindra dan seterusnya dianggap dibacakan.
Golkar dan seterusnya dianggap dibacakan.

481. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada perubahan angka, itu ya.

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Tidak ada.

483. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

P-3 seharusnya 94 (...)

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

P-3 seharusnya=94.952.

485. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu menurut Saudara, ya?

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya. Menurut Saudara berdasarkan bukti yang sudah kami ajukan itu, Yang Mulia.

487. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, oke. Kemudian untuk Dapil Sukabumi, Dapil III Sukabumi, Kota Sukabumi?

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Untuk Dapil III Kota Sukabumi, menurut Pemohon itu adalah 2.756 suara.

489. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

2.756 suara? Itu untuk Saudara Pemo ... suara Pemohon, ya?

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, kursi terakhir ini, Yang Mulia. Setelah dibagi 3 itu kami yang lebih tinggi, Pemohon yang lebih tinggi dibandingkan dengan Partai Golkar.

491. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, ini Saudara mempersoalkan pembagian angka ini ya?

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, berdasarkan bukti-bukti yang kami sudah ajukan.

493. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

495. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya tentu berdasarkan bukti, ndak bisa mengarang-ngarang.

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, Yang Mulia.

497. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Dapil III Kabupaten Bekasi.

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Dapil III Kabupaten Bekasi ini (...)

499. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Suara Pemohon menurut Saudara berapa?

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Suara Pemohon menurut ... suara Pemohon adalah=12.081. Yang Mulia.

501. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

08 ... 0 berapa?

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

12.081, Yang Mulia. Ini ada renvoi.

503. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini tertulis 084?

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya. Betul, Yang Mulia. Itu ada renvoi, ini jadi=12.081.

505. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Termohon sama Pihak Terkait mohon diperhatikan juga ya, ada renvoi untuk angka itu ya.

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

507. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, di sini permohonannya tertulis 12 ribu ... 12.084 yang benar yang tadi dibacakan yang direnvoi 12.081.

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

509.

Ya. Ya.

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya. Itu Pemohon.

511. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, untuk Pemohon.

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Sedangkan untuk kursi kedua Partai Gerindra, ya. Itu seharusnya itu (...)

513. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Menurut Saudara?

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

11.9 ... sori. Bukan, bukan, bukan.

515. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau yang tertulis di sini tadinya 35.866.

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya ya ya. (...)

517. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara tulis setelah dibagi 3?

518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Seharusnya 35.891, Yang Mulia.

519. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ini beda lagi dengan yang ditulis tadi ini.

520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, setelah dibagi dengan angka 3.

521. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, jadi gimana? Menurut Saudara suara Partai Gerindra yang menurut Pemohon itu?

522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

35.891, Yang Mulia.

523. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

35.891, lalu menurut Saudara dibagi 3?

524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, setelah dibagi angka 3.

525. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Hasilnya?

526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

527. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Hasilnya berapa jadinya?

528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Hasilnya 11.363.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi bukan=11.955?

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Bukan.

530. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, 11.300 berapa?

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

11.363.

532. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

11.363?

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

534. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jangan salah lagi ini.

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

536. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena (...)

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

11.363 suara, Yang Mulia.

538. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena matematika saya juga buruk soalnya ini. Jadi, tolong dibagi. Ya, silakan!

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, sehingga selisih 118 suara saja.

540. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

100? jadi selisihnya berapa?

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

118 suara.

542. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan 86?

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Bukan.

544. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

118?

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

546. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pemohon dan Pihak Terkait mohon diperhatikan itu ya ada 3 renvoi di situ, ya. Ya, lalu untuk Dapil II Kota Bekasi apa yang Saudara minta? Itu yang tadi.

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Kota Bekasi itu kita minta dilakukan pemungutan suara ulang Yang Mulia. Untuk 3 Kelurahan (...)

548. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Atau setidaknya-tidaknya pemungutan suara ulang begitu yang tertulis di sini.

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

550. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, Yang Mulia.

552. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Untuk TPS-nya sudah disebutkan sesuai dengan putusan Bawaslu itu, Yang Mulia.

554. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, yang di Kaliabang Tengah itu (...)

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

556. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

TPS 24, 27, 52, 72, 80, 88, 102, 107, 139, 161, 167, 171, 190, 193, 209, 214, 220, 221, 227, 230?

557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, Yang Mulia.

558. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu, ya?

559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, Yang Mulia.

560. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya?

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

562. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu yang di Kaliabang Tengah? Yang Saudara minta kepada Mahkamah pemungutan suara ulang atau setidaknya penghitungan suara ulang?

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Betul, Yang Mulia.

564. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, yang di Kelurahan Teluk Pucung?

565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

TPS 04, terus TPS 120, TPS 13, TPS 07, TPS 67, terus (...)

566. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti dahulu.

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

TPS 64, TPS 65, TPS 59, TPS 58, TPS 35, TPS 29, TPS 23, TPS 107, TPS 182, TPS 108, TPS 181, TPS 175, TPS 176, TPS 166, dan TPS 142 itu yang di Kelurahan Teluk Pucung.

568. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Harapan Jaya?

569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Sedangkan, untuk di Kelurahan Harapan Jaya khusus di TPS 149, TPS 133, TPS 142, TPS 134, TPS 122, TPS 147 (...)

570. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

147 atau 148?

571. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

148, Yang Mulia.

TPS 06, TPS 86, TPS 18, TPS 150, TPS 122, TPS 123, TPS 126, TPS 130, TPS 211, TPS 160, TPS 161, TPS 163, TPS 168, TPS 180, TPS

193, TPS 207, TPS 35, TPS 53, TPS 88, terus TPS 210, TPS 190, TPS 125
... TPS 025, TPS 171, TPS 112, TPS 93, TPS 70, TPS 96 (...)

572. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

96 apa 36?

573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

TPS 39, maaf.

574. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

39 apa 36?

575. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

TPS 39.

576. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan 36?

577. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Maaf, Yang Mulia, TPS 36, TPS 110, TPS 127, TPS 125, TPS 26 ...
28, TPS 103, TPS 08.

578. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

008.

579. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

580. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu, ya?

581. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Dan terakhir, petitem. Memberikan Komisi Pemilihan untuk melaksanakan putusan itu.

582. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Atau?

583. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

584. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang tadi TPS itu yang benar 36, ya?

585. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, Yang Mulia.

586. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Jadi, supaya ndak salah-salah.

587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

TPS 36, Yang Mulia.

588. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti salah objek pula nanti itu ini. Ya, baik.

589. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Terima kasih, Yang Mulia.

590. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu ... anu petitum Saudara. Kemudian yang ini? Itu berarti yang Saudara bacakan sudah termasuk yang perorangan apa belum?

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Perorangan (...)

592. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada Kuasa tersendiri?

593. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Tidak ada, Yang Mulia.

594. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, tidak ada?

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

596. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini ada dari Junaedi, itu siapa itu? Diajukan sendiri?

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Dijawab oleh, Pak Hadrawi.

598. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Siapa? Silakan!

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI

Terima kasih, Yang Mulia.

600. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

601. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI

Untuk perorangan, Partai Persatuan Pembangunan tidak ada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Semua ditarik, diselesaikan ke internal, Yang Mulia.

602. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, yang ... jadi Pak Junaedi itu (...)

603. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI

Bahkan sudah dimediasi.

604. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh. Artinya ini mohon (...)

605. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI

Tidak ada persetujuan dari DPP.

606. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, baik. Ya itu yang mau kami konfirmasi, karena menurut catatan kami memang tidak ada persetujuan.

607. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI

Tidak ada. Ya.

608. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi sudah di ini ya berarti ditarik, ya?

609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI

Ya.

610. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ditarik dan sudah diselesaikan secara adat secara internal.

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI

Akan diselesaikan secara internal.

612. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Baik, kalau begitu. Nah, Termohon dan Pihak Terkait jadi yang itu, kalau ada tanggapan bisa Pihak Terkait terkait dengan itu, karena ini internal, Pihak Terkait yang internallah.

Baik. Kalau begitu untuk Partai Persatuan Pembangunan sudah. Sekarang kami mau mengkonfirmasi beberapa hal berkaitan dengan alat bukti.

Silakan, Yang Mulia!

613. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tolong nanti yang dari ba ... Bawaslu ada, ya? Untuk yang merespons P-3, ya? Yang Nomor 102-10-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 Itu tadi yang masalah rekomendasi meskipun tidak ada, tapi kan dipersoalkan terus sampai ... nanti tolong direspons yang ada dengan Pihak Terkait juga dan KPU juga, ya? Ya. Terima kasih, Pak.

614. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada sedikit konfirmasi saja. Di permohonan ketika mengutip Keputusan KPU Nomor 987 itu, ya, 21 Mei 2019 ditulis pukul 17.00 ... 14.00 WIB, padahal kita semua tahu itu Pukul 01.46 WIB, 17 jam itu ... ininya selisihnya. Yang di perseorangan, tapi sudah ditarik, ya? Ya. Sudah ditarik, ya. Ya, ya. Sudah, oke. Yang jadi soal lagi, ya.

615. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Ini yang sudah berkaitan dengan alat bukti Saudara ada beberapa catatan kami yang nanti mohon diselesaikan setelah persidangan, ya. Pertama, ada P-2 nya yang sudah bermaterai dan sudah dicap, tapi tidak ada tanda tangan cap ... apa ... tanda tangan petugas posnya, itu. Nanti catat dahulu, Pak. Nan ... nanti tolong dianu dulu, nanti berikan reaksi satu-satu. Yang untuk ... ya. Maaf itu untuk yang Dapil Jawa Barat III, ya. Sori sori untuk Dapil III Kota Sukabumi yang di bukti dari P ... itu kan Bukti P-1 sampai P-24 yang Kota Sukabumi. Nah, yang P-2 nya itu ... itu yang tadi saya katakan materainya itu dicap dan sudah ada materai dan dicap, tapi belum ada cap dari pos.

Kemudian, P-6A dan P-6B itu di daftar buktinya ada, tapi fisiknya belum kami terima. Sori itu yang itu yang tadi ini yang ... yang barusan saya sampaikan itu untuk di Dapil II di Kota Bekasi ya, yang buktinya itu P-1 sampai P-90. Jadi, untuk Dapil II Kota Bekasi catatannya adalah tadi, satu bahwa bukti P-6A dan P-6B itu ada di daftar bukti, tapi tidak ada bukti fisiknya. Sebaliknya, untuk P-6 ini Dapil II ya ... Dapil II Kota Bekasi masih, itu di daftar buktinya tidak ada, tapi bukti fisiknya ada P-6 ... P-6. Jadi, di daftar fisiknya Saudara beri tanda P-6, tapi di daftar buktinya tidak Saudara sebutkan itu maksudnya, ya. Fisiknya yang ada kalau yang itu, tapi tidak terbukti tidak Saudara sebutkan tadi fisik ... kalau yang tadi terbalik yang sebelumnya itu terbalik.

Kemudian, P-76 itu ada di daftar bukti, tapi fisiknya yang tidak ada P-76 itu di ini ... di Dapil II Kota Bekasi masih. Kemudian, masih di Dapil II Kota Bekasi, P-78 itu pada daftar bukti tertulis TPS 190, namun di bukti fisiknya itu P-109, itu 0 dan 9 nya bertukar tempat tapi artinya sangat jauh itu anunya. Nanti mohon di ... dikoreksi dulu, diselesaikan dengan Panitera, daftar betul ... daftar bukti untuk Dapil II Kota Bekasi ... ada masalah untuk yang anu yang ... yang P-6A sampai P-6B itu yang tidak ada di bukti fisiknya itu masalahnya. Kalau yang P-6 bukti fisiknya ada, tapi di nomor di daftar bukti tidak Saudara sebutkan. P-76 ada di daftar bukti, tapi itu fisiknya tidak ada supaya tidak dianggap bukti hantu nanti ini, ya itu. P-78 pada daftar bukti itu tertulis TPS 190, tapi di bukti fisik itu yang tertulis itu angkanya adalah 109, jadi antara 190, 109 itu mungkin seperti Saudara baca tadi banyak loncat-loncat itu mungkin, tapi kan kalau angkanya loncat kacau jadinya.

Nah, itu sudah ya. Sekarang yang Dapil III masih Kabupaten Bekasi yang bukti ... daftar buktinya itu P-1 sampai P dengan P-45. Ini ada catatan dari kami di Bukti P-19 itu di daftar bukti tertulis TPS 27 Kecamatan Tambun Selatan, namun di alat bukti fisiknya Saudara menyebu ... menuliskan ... menyebutkan di situ TPS 27 ... 27 Kecamatan Tambun. Ini Tambun Selatan apa Tambun, itu yang ... yang jadi persoalan. Jadi ... jadi itu bukti fisik maupun daftarnya ada, namun

tulisannya berbeda ya. Nah, kemudian Bukti P-25 nya itu belum di leges, P-25 nya belum di leges ... P-25 belum dileges ya.

Nah, ada catatan lain khusus untuk Dapil III Kota ... Kabupaten Bekasi ini. Itu Saudara sebelumnya kan sudah melampirkan Bukti P-21, P-23, P-30, P-32, ya kan? Tetapi Saudara lagi melampirkan bukti yang terbaru kemarin dengan nomor yang sama P-21, P-23, P-30, P-32. Pertanyaannya kemudian, apakah daftar bukti terbaru ini akan mengganti yang lama?

616. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, Yang Mulia.

617. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu ya?

618. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya karena yang pertama itu tidak ada cap dari PPK (...)

619. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke.

620. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Terus yang kedua itu ada cap dari PPK.

621. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti itu mengganti, ya?

622. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, Yang Mulia.

623. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti pertama itu ditarik ya?

624. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

625. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang berlaku adalah yang Saudara serahkan terakhir.

626. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Betul, Yang Mulia.

627. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Nah, kalau begitu selain bukti-bukti yang bermasalah tadi, nah domain yang bermasalah yang maksudnya bukan bermasalah serius sih, tetapi ada yang buktinya tidak ada, ada yang nomornya ada, tapi bukti fisiknya tidak ada atau sebaliknya itu, atau yang masih ada kekurangan secara administratif, salah angka, dan sebagainya, itu mohon diperbaiki nanti.

Nah, selain itu bukti ini akan kita sahkan. Jadi, untuk Dapil Jawa Barat dari P ... dari Bukti P-1 sampai dengan P ... eh Jawa Barat III sori ... Jawa Barat III ... Dapil Jawa Barat III, P-1 sampai dengan P-2.279 itu tidak ada masalah, jadi kita sahkan ya.

KETUK PALU 1X

P ... Dapil III Kota Sukabumi dengan alat Bukti P ... P-1 sampai dengan P-24 masalahnya adalahnya sebagai tadi yang P-2 bermaterai dan dicap tidak ada tanda tangan, kemudian P-6A dan P-6B ada di daftar bukti, tapi tidak ada bukti fisik, P-6 tidak ada di bukti, ada di bukti fisiknya ya sori-sori ... untuk Dapil III Kota Sukabumi hanya P-2 nya yang sudah bermaterai belum dicap, jadi selain itu, selain P-2 itu kita sahkan ya (...)

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Dapil II Kota Bekasi, P-6a dan P-6b itu tadi tidak ada bukti fisiknya. Kemudian P-6 bukti fisiknya ada, nanti tinggal penomoran. Jadi, yang ada bukti fisik ini termasuk yang kami sahkan tapi nanti tolong lengkapi nomornya. Kemudian, P-76 ada di daftar bukti

tapi bukti fisiknya tidak ada. Nah, P-78 daftar bukti fisiknya tertulis 190 dan 109, ini yang ter ... yang termasuk belum bisa kami sahkan ya. Jadi, P-6a, P-6b ... kalau P-6 itu nanti tinggal menambahkan nomor, P-76 itu, P-78 itu belum bisa kami sahkan. Selain itu, dari daftar bukti P-1 sampai dengan P-90, kita nyatakan sah, ya.

KETUK PALU 1X

Nah, untuk Dapil III Kota Bekasi itu ... itu juga yang di bukti fisik tertulis Kecamatan Tambun mungkin sekarang bisa langsung dijelaskan Tambun Selatan apa Tambun yang benar? Tambun Selatan. Ya, itu yang di Dapil III Kabupaten Bekasi, ya?

628. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Dapil III, Pak ya.

629. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya itu bukti ... bukti yang Saudara ajukan di situ P-1 sampai dengan P-45, ya? Nah, jadi, P-25 nya yang belum ada bukti dileges itu, itu belum bisa kami sahkan sekarang. Yang P-19 karena Saudara sudah menegaskan, kami bisa sahkan sekarang bahwa itu Tambun Selatan, ya?

630. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

631. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, dan P-21, P-23, P-30, P-32 yang berlaku adalah yang terakhir Saudara kirimkan. Jadi, yang ... yang sebelumnya yang dengan nomor yang sama ditarik?

632. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

633. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Jadi, itu kita sahkan semua.

KETUK PALU 1X

Demikian. Demikian untuk Partai Persatuan Pembangunan, cukup. Dan sekarang berarti giliran Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Silakan! Siapa yang akan berbicara?

634. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

635. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumussalam.

636. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang telah memberikan kepada kami dari Partai Gerindra untuk menyampaikan permohonan. Kami akan mulai dari nomor perkara Jabar IV, Nomor Perkara 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas nama Pemohon, Habib Mustofa, Daerah Pemilihan Jawa Barat IV, Kota dan Kabupaten Sukabumi. Untuk legal standing kewenangan MK, saya anggap dibacakan. Saya akan memulai dari ujung petitum dan akan sekaligus mengajukan (...)

637. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kenapa ... kenapa dari mulai dari petitum?

638. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Karena ada peristiwa hukum yang menurut kami itu pelanggaran berat yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi. Sehingga kami memandang perlu untuk melakukan perubahan petitum.

639. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana?

640. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya, karena ada peristiwa hukum di Kota Sukabumi (...)

641. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, perubahan petitum itu terjadi kapan ini?

642. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Saat ini yang akan saya ajukan. Jadi begini Yang Mulia, KPU Kota Sukabumi itu telah melakukan pembukaan kotak suara. Ya, kotak suara sebanyak 4 kali di tanggal 25 Juni, tanggal 1 Juli.

643. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi itu tidak ada di dalil permohonan Saudara.

644. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Karena peristiwa hukumnya terjadi belakangan.

645. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya itulah. Oke soal itu, itu soal ... soal yang lain. Tetapi tidak ada di permohonan Saudara, begitu ya?

646. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Betul. Karena tidak ada karena terjadi peristiwa hukum yang terjadi setelah permohonan kita masuk ke MK. Ya, begitu.

647. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti itu akan diserahkan ke Termohon itu untuk menanggapi.

648. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Nah, ini saya kira urgent terkait dengan konstruksi hukum. Ya, oke. Saya, saya jelaskan terlebih dahulu. Pada awalnya petitem kita terdiri dari 9 poin, ya, 9 poin. Dan lebih khusus kepada KPU Kota Sukabumi. KPU Kota Sukabumi dalam narasi posita kita, sudah saya jelaskan bahwa telah dinyatakan terbukti dan sah, serta menyakinkan melakukan perbuatan melanggar ... apa, administrasi.

Jadi begini Yang Mulia, Jabar IV itu terdiri dari Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Kabupaten Sukabumi itu terdiri dari 47 kecamatan. Kota Sukabumi terdiri dari 7 kecamatan. Tetapi dalam pelaksanaan tahapan pemilu, Kabupaten Sukabumi itu mampu lebih dulu menyelenggarakan rekapitulasi pleno, sehingga munculah hasil suara rekap dan itu tersebar ke publik. Dari putusan KPU Kabupaten Sukabumi itu, muncul sebuah opo ... opini publik bahwa partai kami, Pemohon, itu berpotensi mendapatkan 2 kursi. Ya, kursi pertama dan kursi ke-6. Akan tetapi, ya, KPU Kota Sukabumi yang terdiri dari 7 kecamatan, itu lebih akhir menyelenggarakan rekapitulasi pleno sehingga ketika KPU kota melakukan pleno, ya, opini publik dan persepsi publik berubah. Karena partai kami, Pemohon, itu tersalip.

Berdasarkan analisa kami, persebaran jumlah pemilih, ya, jumlah pemilih DPT kabupaten dan kota itu berbanding 90% dan 10%. Jumlah penduduknya lebih besar kabupaten. Sehingga kami menduga ada kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi. Oleh karena itu, kami mengadukan ke Bawaslu Jawa Barat dan Bawaslu Jawa Barat telah memutuskan bahwa KPU Kota telah sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi, dan memberikan peringatan tertulis.

Oleh karena itu, kami pun kemudian melanjutkan mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Tetapi di tengah perjalanan, kami selalu berdebat di media. Saya press release, KPU dan Bawaslu press release. Press release yang dilakukan oleh KPU kota dan Bawaslu itu underestimate terhadap kami. Seluruh alat bukti kami sampaikan. Ya, itu. Oleh karena itu, ini sangat penting menurut saya. Kami masih meyakini bahwa kotak suara yang disimpan oleh KPU Kota Sukabumi itu sangat terjamin keamanannya, sangat terjamin kerahasiaannya, dan sangat terjamin keasliannya. Oleh karena itu, kami mengajukan pembukaan kotak se-Kota Sukabumi, dalam permohonan awal. Tapi karena KPU Kota Sukabumi telah lancang mendahului pembukaan kotak suara yang menurut kami itu adalah sebuah pelanggaran hukum yang sangat krusial, maka kami akan mencabut permohonan ini, dan akan meminta kepada Majelis untuk perhitungan penentuan calon kursi terpilih tidak mendasarkan kepada rekapitulasi

yang dilakukan oleh KPU kota, tetapi berdasarkan rekapitulasi Kabupaten Sukabumi.

649. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti kalau begitu, total berubah konstruksi permohonan Saudara?

650. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Tidak, Yang Mulia. Karena apa? Karena rekapitulasi kabupaten/kota itu tidak mempengaruhi calon ... apa ... kursi terpilih yang lain. Kursi terpilih nomor 1 (...)

651. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan. Argumentasinya kan total berubah jadinya, kan?

652. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. Ada tambahan.

653. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kan?

654. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ada tambahan.

655. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan tambahannya substansial sekali.

656. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Betul. Karena ada peristiwa hukum.

657. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Peristiwa hukumnya terjadi belakangan. Kan begitu?

658. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

659. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi kan kita berpegang pada hukum acara. Tapi silakanlah Saudara menyampaikan permohonan itu. Ya, teruskan!

660. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. Karena ada peristiwa hukum. Walaupun memang Pihak Termohon dalam memilih KPU melandaskan dasar pembukaan kotak itu adalah pada PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 95. Saya sekaligus ingin mengkritik terhadap PKPU itu di dalam forum majelis ini. PKPU Nomor 4, ya, Tahun 2019 Pasal 95 itu memberikan kewenangan kepada KPU selaku Termohon untuk menginstruksikan kepada jajaran di bawahnya melakukan pembukaan kotak suara dalam kepentingan untuk mengambil alat bukti yang tersimpan di dalam kotak suara itu. Tetapi, Konsideran PKPU Nomor 4, ya, yang dilandaskan oleh Termohon adalah Pasal 395 ayat (1), Pasal 400 ayat (1), Pasal 404 ayat (1), dan Pasal 408 ayat (1), itu berbicara tentang jenjang rekapitulasi.

661. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begini Saudara Saudara, maaf saya tengah.

662. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

663. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kita memahami ... kami memahami argumentasi itu. Tapi begini, itu kan forumnya berbeda itu. Forumnya itu nanti kalau Saudara berkeberatan dengan itu ada pengujiannya.

664. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Betul.

665. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, ada pengujiannya. Tetapi kalau Saudara mau jadikan itu sebagai bagian dari pembuktian, tidak masalah. Tetapi kalau itu nanti ujungnya adalah atas dasar itu kemudian Saudara menyalahkan lalu untuk membenarkan dalil, tentu harus pada pernyataan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini kan kemana harusnya kalau PKPU diajukan permohonan pengujian. Itu ... itu di luar kewenangan kami.

666. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

667. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pertama harus kami ingatkan terlebih dahulu itu.

668. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

669. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Sebelum berlanjut. Tapi kalau Saudara mendarmakan pada argumentasi itu, nanti akan di tanggapi oleh Termohon dan Pihak Terkait yang berkaitan dengan itu.

670. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

671. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan kemudian diteruskan!

672. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Saya ... saya lanjutkan.

673. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

674. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Okelah kalau itu sah, PKPU itu. Pasal 95 itu mengatakan bahwa KPU Kota punya kewenangan untuk membuka. Tetapi, harus kaitannya dengan PHPU, Perselisihan Hasil Pemilu.

675. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Izin, Pak Ketua. Saudara Pemohon, Kuasa?

676. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya?

677. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang Anda sampaikan itu ada dituangkan dalam bukti tertulis tidak?

678. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Tidak ada, Yang Mulia.

679. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada?

680. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Karena terjadi peristiwa hukum sebelumnya.

681. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya kapan peristiwa itu terjadi?

682. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Tanggal 25 Juni.

683. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kan ada waktu untuk menuangkan dalam bentuk tertulis, sehingga di persidangan bisa kami terima sebenarnya. Kalau narasi Anda ini secara tertulis, bagaimana kita bisa me-cover?

684. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. Karena ini terkait dengan perubahan petitum.

685. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, silakan! Sekarang apa saja yang diubah?

686. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. Saya ubah (...)

687. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau ditambah atau dikurangi dari 9 itu?

688. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Dari 9 itu, poin 2, poin 4, 5, 6, kemudian 9, kami cabut.

689. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tolong diulang! Yang berapa saja? 2?

690. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

2.

691. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus?

692. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Membatalkan Berita Acara yang KPU Kota itu.

693. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya?

694. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Kemudian melakukan pembukaan kotak suara di KPPS Kota Sukabumi itu kami cabut karena telah dilakukan oleh KPU.

695. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Membatalkan Berita Acara yang angka 2, ya?

696. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

697. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dicabut?

698. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Dicabut.

699. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus?

700. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Yang kelima. Membuka dokumen C-7.

701. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dicabut juga?

702. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. Cabut juga.

703. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

5. Terus berapa lagi?

704. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Nomor 6.

705. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

6?

706. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. Kami cabut.

707. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Yang identifikasi?

708. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. Nomor 9 juga kami cabut. Kemudian, ada pada nomor 7 yang ini yang sangat kursial menurut saya.

709. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada nomor 7?

710. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

711. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dicabut juga?

712. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Bukan. Ditambahkan, Yang Mulia. Nah, itu.

713. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tambahannya apa?

714. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon.

715. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah sama itu?

716. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Berdasarkan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hanya rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

717. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, seterusnya dihapus hanya didasarkan pada rekapitulasi Kabupaten Sukabumi?

718. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

He eh. Maksud saya begini (...)

719. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jangan he eh di sini, ya, begitu.

720. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. KPU Kota itu tidak ... tidak usah diikutsertakan dalam penentuan itu.

721. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Kan sudah jelas.

722. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Nah, itu.

723. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bahwasanya Sukabumi berdasarkan KPU (...)

724. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Kabupaten saja. Perhitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi saja. Kota di ini.

725. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Jadi, argumentasi argumen yang Anda sampaikan yang secara lisan tadi?

726. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. Nanti akan saya sampaikan di persidangan berikutnya.

727. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apalagi? Sudah enggak ada lagi? Nanti tinggal jawaban atau tanggapan dari Pihak Termohon dan Pihak Terkait. Anda tidak ada lagi ruang untuk menyampaikan sesuatu lagi.

728. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Terkait pembukaan kotak yang kami ajukan sebagai bukti baru.

729. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti dibuktikan saja kalau memang Anda ingin membuktikan. Tapi, bukan forum yang Anda ingin menyampaikan apa yang secara tertulis tadi.

730. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

731. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah, ya?

732. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

733. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu. Yang jelas karena Saudara mengajukan hal yang tadi disampaikan secara lisan itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka satu, di samping kepada Termohon berhak untuk memberikan tanggapan pada soal itu dan juga kepada Pihak Terkait, kami juga akan memberikan pertimbangan tersendiri nanti di dalam melalui putusan. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia. Karena sesuai dengan hukum acara sudah ketat diatur kapan batas permohonan diajukan, kapan perbaikan dilakukan, apa yang boleh dilakukan diperbaiki itu semuanya sudah ada.

Nah, Saudara mendasarkan pada peristiwa terakhir yang kemudian Saudara jadikan sebagai bahan pertimbangan atau bahan argumentasi dalam permohonan Saudara untuk mengubah petitum permohonan dan sebagian dari konstruksi permohonan awal pada kesempatan ini. Itu tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri. Karena ada ... ada perbedaan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi dan Termohon mempunyai hak untuk menanggapi itu demikian juga Pihak Terkait kalau ada. Jadi, demikian, ya.

734. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Dan ... mohon izin, Yang Mulia.

735. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

736. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Selain itu kami juga mengajukan tambahan alat bukti.

737. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tambahan alat bukti?

738. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

739. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, tambahan alat buktinya sekarang baru diajukan?

740. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

741. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baru diajukan? Berarti belum bisa kami sahkan sekarang nanti pada persidangan (...)

742. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Alat bukti yang sementara kami ajukan adalah sebanyak 421. Karena ada peristiwa hukum tadi itu, maka kami kemudian juga mengajukan bukti-bukti baru.

743. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya. Tapi kan belum bisa kami verifikasi ... harus kami verifikasi dulu.

744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

745. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekarang baru Saudara ajukan kan?

746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

747. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terus status dari alat bukti yang lama bagaimana?

748. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Tetap kami ajukan.

749. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tetap?

750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

751. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, alat bukti yang lama ini, ini yang di catatan kami ini. Ini yang Pak Mustofa ini, kan?

752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. Ya, Yang Mulia.

753. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang Saudara ... yang anukan ini yang Pak Mustofa ini?

754. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

755. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di bukti awal itu Saudara menyampaikan bukti dengan kode P-1 sampai dengan P-421?

756. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

757. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

758. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

759. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Catatan kami itu begini, P-4, P-6, P-18, P-19, P-54, P-62, P-107, ya, itu tidak ada bukti fisiknya, P-4, P-6, P-18, P-19, P-54, P-62, P-107 itu tidak ada bukti fisiknya.

760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

761. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tolong dicatat. P-11 itu ada, tapi tidak ada materai. P-20 di situ tertulis di alat bukti P-120, jadi ada salah identifikasi.

762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

763. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Daftar buktinya P-20, tapi tertulis di alat buktinya P-120. Kemudian, P-338, P-346, P-349, P-359, P-408 itu bermaterai, tapi tidak ditandatangani. P-360 itu, ya, masih kopi leges.

Kemudian, yang ada menggunakan kode U-3 itu agak unik itu. Kalau Saudara ... kan sudah ada pedoman penandaan bukti, ya, kalau untuk Pemohon itu P di awalnya ini kok ada U tersendiri, U-3 itu dan itu tidak ada bukti fisiknya.

764. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Itu yang utama, Yang Mulia. Jadi, memisahkan kita narasi hukum itu pertama yang kualitas.

765. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

766. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Yang kedua yang kuantitas.

767. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi itu sudah ada di ... di (...)

768. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Nah, yang kuantitas itu kita identifikasi dengan Bukti V, gitu loh.

769. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ndak bisa itu kan baru semuanya P kalau Pemohon. Nanti kalau begitu ada U ada V kalau sesuka-suka Saudara membuat tanda bukti kan jadi kacau proses beracara kita.

770. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya ... ya kami perbaiki, Yang Mulia.

771. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti diperbaiki itu. Kemudian juga ada U-5 itu ya. Jadi, udah U-1 sampai dengan U-26 itu. Namun di ... di bukti apa namanya di alat buktinya itu tertulis keputusan KPU begitu kan. Yang U ... U-5 itu di daftar bukti itu tertulis Berita Acara Penetapan, tetapi di bukti fisiknya itu keputusan KPU. Itu U-5 itu, ya. Tolong nanti dicatat nanti ininya. Nah, catatan kami berikutnya itu pada halaman 2 di daftar bukti di bagian tabel itu tertulis U-20 sampai dengan U-26. Padahal apa namanya seharusnya itu sampai U-25 aja. Tapi nanti U-nya ini sekaligus sudah diubah, ya.

772. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

773. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu. Nanti ada U. Nanti ada TU lagi, Tak Utama. Kan susah nanti kita ininya. Kalau Saudara menggunakan terminologi-terminologi itu. Atau TTU, Tak Terlalu Utama. Nanti ada TTM lagi kan repot kita ini. Tak Terlalu Mempengaruhi maksudnya ini, begitu Saudara. Jadi, rusak nanti itu ya. Ya, ini. Tolong diinikan ya. Yang kami berikan catatan-catatan itu belum bisa kami saahkan sekarang, ya. Ya, jadi selain dari nomor-nomor itu dari bukti yang Saudara ajukan P-1 sampai dengan 21 itu kecuali yang tadi kami berikan catatan kami saahkan, ya. Baik.

KETUK PALU 1X

Baik, demikian dari Gerindra.

774. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Izin, Yang Mulia.

775. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan!

776. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Terima kasih.

777. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

778. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Perkenankan, kami dari Partai Be ... Gerindra dalam hal ini ingin menyampaikan permohonan Hasil Perselisihan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

779. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, saya baru mau menyampaikan itu. Ya sudah teruskan kalau begitu.

780. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya, terima kasih Yang Mulia. Izin, mungkin bisa menjelaskan terkait tadi yang dibacakan oleh rekan kami dalam hal ini Perwakilan untuk PHPU Jabar IV atas nama Mustofa, ini diwakili oleh Kuasa Hukum. Namun dari kami, sudah memberikan rekomendasi DPP jadi terpisah dari kami. Ya.

781. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

782. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya, dari Kuasa Hukum, Saleh Hidayat.

783. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, maksudnya gimana?

784. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Untuk yang disampaikan baru saja ya. Disampaikan oleh perorangan (...)

785. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Itu memang diregistrasinya juga begitu.

786. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya.

787. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Perorangan tapi dari Gerindra, kan begitu.

788. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Betul, betul.

789. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kuasa Hukumnya berbeda.

790. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya. Betul, Yang Mulia. Dari kantor hukum tersendiri.

791. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Saudara sekarang yang dari DPP Partai dari Partai Gerindra.

792. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar, Yang Mulia.

793. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dengan Kuasa Hukum tersendiri.

794. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya, benar.

795. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan! Apa yang mau disampaikan?

796. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Perkenankan dalam hal ini kami akan membacakan permohonan PHPU Provinsi Jawa Barat DPR RI Jabar VIII atas nama Mujahidin Nur Hasyim. DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi V atas nama Haryanto. DPRD Kota Bogor Dapil Bogor I atas nama H.M Idris. DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan I atas nama Eka Satria Romadhan. Sebelum mungkin kami membacakan permohonan kami, izin ada yang ingin dipertanyakan, Yang Mulia. Jadi, pada waktu awal kemarin, pada waktu permohonan awal, dari Pemohon dalam hal ini DPR RI Jabar VIII atas nama Mujahidin Nur Hasyim tercantum. Namun pada saat perbaikan, memang tidak kami cantumkan pada waktu itu. Dan kemarin kami mencoba menanyakan di ... pada waktu memasukkan berkas di bawah dan hal ini harus mendapat persetujuan dari Majelis dan di sidang MK ini. Apakah masih bisa diikutsertakan, Yang Mulia?

797. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begini, Saudara itu status dari perbaikan permohonan Saudara itu melengkapi atau perbaikan?

798. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Perbaikan, Yang Mulia.

799. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Perbaikan?

800. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya.

801. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau perbaikan, berarti mencabut permohonan di awal?

802. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar, Yang Mulia.

803. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Benar?

804. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar.

805. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau mencabut permohonan di awal berarti tidak boleh dicantumkan, kan begitu, kan. Di permohonan awal, permohonan awalnya Saudara cabut?

806. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Tidak. Ya, perbaikan (...)

807. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dengan perbaikan?

808. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya.

809. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti yang permohonan awalnya sudah ndak berlaku lagi kan begitu. Ya, toh?

810. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Maksud kami, pada waktu itu kenapa tidak dicantumkan perbaikan karena kami cukup pada waktu itu, Yang Mulia. Walaupun pada saat akhir kemarin dari yang beRsangkutan juga mengajukan perbaikan dan kami sudah masukkan.

811. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu yang ... yang ... yang menjadi soal. Karena akan berbeda halnya kalau ada permohonan yang tidak lengkap dan kemudian dia melengkapi. Jadi statusnya yang ... yang ... yang belum lengkap itu kan ikut.

812. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar.

813. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau ini Saudara melakukan perbaikan dan Saudara menyatakan tadi mencabut. Berati kan tidak ikut itu permohonannya yang awal. Ini supaya jadi jelas bagi Termohon dan Pihak Terkait untuk menanggapi itu ... itu tujuannya supaya fair, gitu lho. Jadi, kalau ini kan jadi tidak fair nanti mana yang akan ditanggapi oleh ini gitu. Itu yang jadi anu Saudara. Buat perhatian Saudara. Jadi, kami minta sekali lagi, Saudara melakukan perbaikan dan berarti mencabut permohonan yang awal, begitu?

814. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Perbaikan, Yang Mulia.

815. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, perbaikan dan mencabut permohonan yang awal?

816. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya. Perbaikan.

817. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang tegas dong!

818. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya. Kami perbaikan ... melakukan perbaikan, namun niat kami sebetulnya di sini adalah melakukan perbaikan (...)

819. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu.

820. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Yang tidak terkait dengan yang Jabar VIII dalam hal ini.

821. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya ... ya. Itu yang jadi ... yang jadi persoalan.

822. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, yang Jabar VIII mau dikeluarkan?

823. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Tidak dikeluarkan, Yang Mulia.

824. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di perbaikan?

825. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Dikeluarkan dalam perbaikan ya. Tidak ada dalam perbaikan.

826. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ... tidak termasuk yang ada dalam perbaikan?

827. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya. Pada waktu itu, Yang Mulia.

828. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi mana sekarang perbaikannya?

829. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Sudah disampaikan pada waktu itu.

830. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktu kapan?

831. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Saya ... sebelum ... ada dalam T3B, Yang Mulia.

832. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Tapi itu juga disampaikannya 2 Juli, ya?

833. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar, Yang Mulia.

834. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti diperim ... pertimbangkan (...)

835. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itukan kembali lagi saya harus mengingatkan. Bagaimanapun hukum acara itu tetap harus di ... harus ditaati. Ada tenggang waktu

kapan mengajukan perbaikan, kemudian ada penegasan bagaimana itu. Nah itu. Nah, kalau perbaikannya menyatakan, misalnya bahwa permohonan yang pertama tetap berlaku dan ini sifatnya melengkapi, nah perbaikannya itu menyatakan begitu itu ikut, dan tenggang waktunya tidak boleh dilewati, nah itu. Tapi, karena ini kesempatan Saudara untuk menyampaikan permohonan itu silakan disampaikan dahulu! Nanti itu akan ditanggapi tersendiri oleh Termohon dan Pihak Terkait, dan kami sendiri juga akan menentukan sikap mengenai soal ini di dalam setelah kami mempertimbangkan perkara ini nanti. Silakan!

836. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Mengenai kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU terhadap penetapan pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei Pukul 23.08 WIB. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon yang ... permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai pokok permohonan Provinsi Jawa Barat, DPR RI Dapil Jawa Barat VIII atas nama Mujahidin Nurhasyim bahwa perolehan suara Pemohon dalam hal ini yang sebenarnya adalah=36.727 dan perolehan yang ditetapkan Termohon=35.227, sehingga terjadi selisih kurang lebih=1.500 suara. Bahwa pengurangan suara Pemohon tersebut terjadi pada Kecamatan Harjamukti adalah sebesar ... perolehan yang sebenarnya dimana pada saat rekapi ... izin, Yang Mulia, ralat, mengenai perolehan suara Pemohon pada Kecamatan Harjamukti adalah sebesar=2.437 suara (...)

837. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar! Yang Saudara bacakan ini yang Saudara perbaikan yang Saudara sampaikan 2 Juli itu?

838. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar, Yang Mulia.

839. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu, ya?

840. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar.

841. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Silakan teruskan!

842. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya=2.437 suara, namun faktanya pada saat rekap pada DB1 DPR perolehan suara Pemohon berkurang menjadi=1.437 atau berkurang sebanyak 1.000 suara.

Bahwa pengurangan suara Pemohon tersebut sangat signifikan pada saat rekapitulasi pleno tingkat Kota Cirebon, perolehan suara Pemohon pada Kecamatan Lemah Wungkuk adalah sebesar 1.003 suara, namun faktanya pada saat rekap DB1 DPR perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 503 atau berkurang sebanyak 500 suara.

Bahwa selanjutnya uraian sebagaimana angka 2 dan 3, berdasarkan perolehan suara Pemohon tercantum dalam DB1 DPR untuk Kota Cirebon, perolehan suara Pemohon adalah=4.905 suara, namun ternyata rekapitulasi nasional perolehan suara Pemohon menjadi=3.405 suara atau terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.500 suara. Bahwa atas peristiwa tersebut, Pemohon dalam hal ini telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana tanda bukti penerimaan Laporan Nomor 010 tertanggal 10 Mei 2019 yang selanjutnya oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutuskan bahwa berdasarkan Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu yang pokoknya menyatakan KPU Kota Cirebon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dan memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kota Cirebon.

Bahwa selain dari pada itu juga terdapat pelanggaran oleh KPU Kabupaten Cirebon dimana terjadi pengurangan suara Pemohon pada saat tim kampanye Pemohon melakukan pengecekan C-1 dan DAA-1 ternyata telah terjadi perubahan perolehan suara Pemohon, yaitu pada TPS Desa Bayalangu Lor, Kecamatan Gegesik Pemohon sebanyak 44 suara berkurang menjadi 4 suara. Dan TPS 31 perolehan suara Pemohon semula 84 berkurang menjadi 74 suara. Dan TPS 05 Desa Minyong, Kecamatan Susukan perolehan suara Partai Gerindra yang semula 28

berkurang menjadi 16 suara. Bahwa untuk hal tersebut juga telah dilaporkan kepada Bawaslu Jawa Barat sebagaimana bukti tanda penerimaan Nomor 102 tertanggal 13 Mei 2019 yang kemudian da ... oleh Bawaslu juga telah diputus sebagaimana Fomulir Putusan Acara Cepat, Pelanggaran Administratif pemilu yang pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Cirebon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dan memberikan sanksi peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Cirebon.

Petitum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang dimaksud di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Mengabulkan per ... permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, membatalkan Keputusan KPU Nomor 987 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD. Tiga, menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR ... DPR RI ... DPR RI Jawa Barat VIII Mujahidin Nurhasyim dengan peruh ... perolehan suara Pemohon=36.727. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpe ... berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ini untuk Jawa Barat VIII, Yang Mulia.

843. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini untuk Dapil Bekasi V, ya?

844. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Untuk Dapil Bekasi V mungkin akan dibacakan oleh rekan saya.

845. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, yang singkat-singkat saja ya. Jadi nanti poin-poinnya saja, apa yang menjadi alasan utama itu.

846. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Mohon izin, Yang Mulia.

847. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan!

848. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Demikian saya sampaikan bahwa Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nomor Urut 2 Partai Gerindra yang seharusnya mendapatkan suara tertinggi dari caleg lainnya termasuk Termohon. Kemudian pada tanggal 17 April 2019 di ... diselenggarakan pemungutan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Desa Sumber Sari, Kecamatan Bebayuran dan berdasarkan hasil DAA-1 Desa Sumber Sari 23 TPS sebagai berikut. Suara Partai Gerindra=130 suara. Kemudian suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Husni Thamrin mendapatkan=142 suara. Kemudian suara Caleg Nomor 2 atas nama Harianto mendapatkan=26 suara. Kemudian huruf D sampai H (...)

849. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya itu dianggap dibacakan!

850. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Dianggap dibacakan. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2019, KPUD Kabupaten Bekasi menetapkan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD perolehan suara berubah menjadi.

- a. Suara Partai Gerindra dari 130 menjadi 31 suara. Kemudian Caleg Nomor Urut 1 atas nama Husni Thamrin berubah dari 142 menjadi 241 suara. Kemudian Caleg Nomor 2 atas nama Harianto yang sebelumnya mendapatkan 26 suara menjadi 27 suara. Kemudian angka D sampai H dianggap dibacakan. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan menyelesaikan perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD mohon izin ... DPD, DPRD oleh KPU Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Mei 2019. Yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 30/PA.02.6-BA/3216-KPU Kabupaten/V/2019 dan Berita Acara tertanggal 13 Mei 2019. Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan oleh adanya pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif oleh PPK Pebayuran maupun yang dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 1 atas nama Husni Thamrin. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara setruf ... terstruktur, sistematis dan masif pada

proses rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan Pebayuran untuk dibawa pada saat rapat pleno di tingkat KPUD Kabupaten Bekasi.

851. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke, dan selanjutnya itu sudah uraiannya kan, mengapa Saudara menganggap begitu?

852. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Baik. Ya.

853. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lalu?

854. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Kemudian (...)

855. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada juga pelanggaran setelah pencoblosan?

856. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ya.

857. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

858. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ya, Yang Mulia.

859. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu a sampai b, c, kan?

860. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Baik.

861. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, intinya Saudara sudah melapor juga, begitu kan?

862. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ya, baik, Yang Mulia.

863. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, terus yang sekarang diminta ke Mahkamah apa, gitu saja. Dengan ... dengan pelanggaran-pelanggaran itu?

864. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Petitum (...)

865. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Coba mulai ... mulai dari ini ... dari ... dari yang penting itu, yang mulai dari angka 11 di halaman 11 itu, coba.

866. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ya. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip-prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara. Kemudian penggelembungan suara untuk Caleg Husni Tamrin dan mengurangi perolehan suara partai sehingga patut dan wajar untuk dilakukan pengoreksian suara dan/atau menetapkan suara pasangan calon yang benar sesuai peringkat sebagai berikut. Nomor 1,

Haryanto=5.835. Kemudian, Husni Tamrin=5.778. Nomor 3 sampai 6 dianggap dibacakan.

867. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Sekarang petitumnya apa yang Saudara minta?

868. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Petitumnya kita sampaikan bahwa yang pertama mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT-06-KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional dalam pemilihan umum pada tang ... Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil V. Kemudian, menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi. Suara perolehan Gerindra sebesar=8.660 suara. Kemudian, Husni Tamrin sebesar=505.778 suara. Kemudian, Haryanto=5.835 suara. Nomor 3 sampai dengan 7, kita anggap dibaca. Kemudian nomor 4, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

869. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Masih ada lagi?

870. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ingin menyampaikan terkait dengan DPRD Kota Bogor. Dapil Kota Bogor 1 atas nama H. M. Idris, perolehan suara menurut Pemohon, H. M. Idris, 2.000 ... 2 ... izin sebentar, Yang Mulia. Terima kasih. Perolehan suara menurut Pemohon, 2.000 ... 2.093 untuk H. M. Idris. Ema Rahmawati=431, Termohon=421. Siti Nur Maulina=2.106, Termohon=2.296. Bubun Junaedi, Pemohon=730, Termohon=550. Bahwa dalam hal ini terkait dengan permohonan.

871. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu menurut perhitungan Saudara, ya?

872. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya. Benar.

873. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Setelah ... setelah Saudara mempersoalkan apa namanya ... perolehan di mana itu ... di Kelurahan Babakan, Sempur.

874. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar, Yang Mulia.

875. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tegal ... Tegalek apa Tegalega ini?

876. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Tegal (...)

877. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kelurahan Tegalek apa, apa itu? Kemudian, kemudian Kelurahan Panaragan. Itu perolehan-perolehan suara itu yang Saudara persoalkan begitu kan?

878. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar, Yang Mulia.

879. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, Nah. Sehingga menurut Saudara, perolehan suara yang benar yang Saudara sampaikan tadi, gitu ya?

880. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar, Yang Mulia.

881. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

H.M. Idris harusnya menurut Saudara 2.093 suara, Ema Rahmawati menurut Saudara itu 431 suara?

882. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar, Yang Mulia.

883. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Siti Nur Maulina menurut Saudara itu adalah 2.106 suara?

884. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya.

885. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sedangkan Bubun Junaedi, S.H., menurut Saudara itu suaranya 730?

886. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar, Yang Mulia.

887. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan ini yang berbeda dengan penetapan atau yang dilakukan oleh Termohon?

888. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar.

889. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang untuk Pak Idris itu ditulis sama=2.093 suara, kan?

890. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya, benar, Yang Mulia.

891. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Emma Rahmawati yang berubah yang menurut Termohon itu 421?

892. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar.

893. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Siti Nur Maulina menurut Termohon itu 2.296? Gitu ya?

894. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar, Yang Mulia.

895. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan Bubun Junaedi, S.H., menurut Termohon itu adalah 550?

896. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar, benar.

897. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi isi itulah kira-kira keseluruhan substansi dari permohonan Saudara ya?

898. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar, Yang Mulia.

899. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi demi keterbukaan, silakan dibacakan petitumnya selengkapnya!

900. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan permohonan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional per tanggal 21 Mei sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kota Bogor, Dapil Bogor I.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Dapil Bogor I. Perolehan suara Pemohon H.M. Idris Nomor Urut 3, H.M. Idris adalah=2.093. Nomor Urut 5, Ema Rahmawati=431, Siti Nur Maulina=2.106, Bubun Junaedi S.H.=730.
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

901. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. masih ada lagi?

902. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya, baik, Yang Mulia.

903. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan!

904. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ini DPRD Kabupaten Kuningan (...)

905. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dapil I, ya?

906. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya. Dapil Kuningan I.

907. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan!
Apa persoalannya di sini?

908. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya. Bahwa dalam hal ini, perolehan suara menurut Pemohon, 2000 ... 2.120 dan menurut ketetapan Termohon 2.118. Untuk atas nama Eka Satria Ramadhan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 Sri Laila Sari, perolehan suara menurut Pemohon adalah 2.113 sedangkan menurut Termohon adalah 2.123.

909. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu?

910. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya?

911. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu kekeliruan Termohon menurut Saudara? Ya?

912. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya.

913. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dengan alasan-alasan sebagaimana disampaikan ... Saudara sampaikan dari halaman 18 sampai dengan halaman 19 itu, begitu?

914. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar, Yang Mulia.

915. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh ya. Bisa diteruskan!

916. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Jadi bahwa persandingan data yang dilakukan oleh Termohon tidak menggunakan data yang berasal dari hasil rekapitulasi Kabupaten Kuningan, akan tetapi bersandingan tersebut dilakukan dengan merujuk pada DB-1, DA-1, dan hasil scan foto Form C-1 yang dimiliki oleh Bawaslu.

917. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu yang Saudara gunakan sebagai rujukan?

918. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar, Yang Mulia.

919. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, dari rujukan persandingan itu, Saudara mendapatkan temuan angka-angka seperti yang Saudara sampaikan tadi, begitu?

920. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar. Benar, Yang Mulia.

921. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Oke. Kalau begitu Petitum yang Saudara minta?

922. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana maksud di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional tertanggal 21 Mei 2019 sepanjang di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Dapil Kuningan I, renvoi di sini izin, Yang Mulia. Dapil Kuningan II semestinya Dapil Kuningan I, Yang Mulia.

923. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke.

924. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

3. Menetapkan hasil perolehan yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Kuningan I. Renvoi di sini, Yang Mulia.

925. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

926. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Atas nama Eka Satria Ramadhan, perolehan suara ... perolehan suara 2.120 suara. Sedangkan untuk Sri Laila Sari, 2.113 suara.

4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

927. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Menurut catatan kami dari Gerindra sudah semua, ya?

928. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Benar, Yang Mulia.

929. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul. Nah, sekarang saya mau menyampaikan konfirmasi mengenai alat bukti yang Saudara ajukan ini. Untuk Dapil Kuningan I ini tolong diingat catatannya, ya, softcopy itu tadi hanya tertera P.2 DPRD Kab 1 sampai dengan P.2 DPRD Kab 3. Itu jadi berbeda dengan alat bukti yang ada di hardcopy yang tertulis P-2 DPRD Kab 1, P.2 DPRD Kab 20. Jadi, di softcopy-nya itu hanya tertera sampai Kab 3, di hardcopy sampai Kab 20. Nah, itu di dalam softcopy-nya setelah kami periksa itu ternyata daftar buktinya juga tidak lengkap, ya. Itu.

Kalau untuk hardcopy-nya itu yang itu tolong dilengkapi, ya.

Nah kemudian, untuk Kabupaten Dapil Kota Bogor I itu softcopy-nya hanya tertera P.2 DPRD Kota 1 sampai dengan P.2 DPRD Kota 3. Itu berbeda dengan alat bukti di hardcopy yang tertera P.2 DPRD Kota 1 sampai dengan P.2 DPRD Kota 9. Jadi, softcopy daftar bukti itu tidak lengkap, sama dengan yang pertama. Jadi, ada catatan untuk Dapil Kuningan I dan Dapil Kuningan ... Dapil Kota Bogor I, ya. Ada catatan lain untuk Dapil Kota Bogor I ini, yaitu tercantum P.2 DPRD Kota 9 itu bukti fisiknya tidak ada yang Saudara sebutkan di bukti P.2 DPRD Kota 9 itu bukti fisiknya tidak ada, mohon dicatat itu, ya.

Kemudian untuk Dapil Bekasi V, Kabupaten Bekasi V. Itu softcopy itu tertera P.2 DPRD Kab 1 sampai dengan P.2 DPRD Kab 3 itu berbeda dengan alat bukti hardcopy-nya yang tertera P.2 DPRD Kab 1 sampai dengan P.2 DPRD Kab 11. Ini sama juga problem-nya softcopy daftar buktinya tidak lengkap, ya. Nah, lalu ini ada catatan pada tanggal 2 Juli 2019 Saudara memberikan tambahan alat bukti dan alat bukti P.2 DPRD Kab 11. Namun, pada tanggal 30 ... apa namanya ... Mei 2019 Saudara juga menyerahkan daftar bukti dan alat bukti yang salah satunya juga mencantumkan P.2 DPRD Kab 11. Jadi, terdapat 2 alat bukti yang berbeda, tetapi nomor buktinya sama menurut anu Saudara. Ini nanti bagaimana, apakah dua-duanya akan Saudara tetap cantumkan ataukah salah satunya akan Saudara cabut? Kalau dua-duanya tetap dicantumkan berarti Saudara harus memberikan penomoran yang berbeda. Kalau salah satunya akan Saudara cabut berarti nomor hanya 1 dari ... dari yang yang Saudara gunakan dengan nomor yang sama itu nanti yang akan berlaku, begitu. Ya, bagaimana?

930. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya, Yang Mulia. Mungkin untuk terkait dengan P.2 DPRD Kabupaten 2 terakit dengan berita acara, Yang Mulia.

931. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti ... nanti yang saya berikan catatan itu nanti (...)

932. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Ya.

933. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara ini kan dengan ... dengan Panitera, ya?

934. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KORNELIUS WIDINUGHROHO

Baik, Yang Mulia.

935. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, selebihnya dari yang kami berikan catatan itu setelah melalui verifikasi kami sudah bisa kami sahkan, gitu, ya. Yang catatan kami itu tolong dikoreksi lagi. Demikian, ya?

Baik, dengan demikian, bukti yang di luar catatan tadi kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Sampai dengan saat ini Partai Berkarya (...)

936. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Yang Mulia?

937. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

938. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA

Mohon izin, Termohon.

939. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

940. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA

Untuk memberikan tanggapan terkait Gerindra.

941. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tanggapan apa dulu? Nanti (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA

Apa yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon terkait ada berbagai perubahan di dalam permohonan dan juga terkait dengan barang bukti barangkali.

942. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

943. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA

Terima kasih, Yang Mulia.

944. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti itu yang Saudara nanti ... tadi kan sudah di awal sudah saya sampaikan.

945. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: DEDI MULYANA

Ya.

946. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan. Saudara menanggapi itu. Kami sudah menyampaikan ketentuan hukum acaranya seperti ini, kami juga sudah ingatkan kepada Pemohon menegaskan dan konfirmasi kepada Pemohon apakah Saudara mencabut atau merupakan perbaikan sudah ditegaskan tadi. Silakan, Saudara nanti hak Saudara untuk menanggapi itu, ya?

947. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Ya.

948. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara Termohon.

949. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Saat ini barangkali bisa disampaikan?

950. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Eggak, enggak. Nanti kan ada waktunya nanti.

951. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Ya, terkait barang bukti, Yang Mulia.

952. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terkait barang bukti?

953. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Begini, pada tanggal 5 kami sudah mengajukan barang bukti terkait Perkara Nomor 169 (...)

954. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He eh.

955. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Ya, jawaban berikut barang bukti.

956. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

957. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Karena memang kejadiannya itu adalah secara serempak, kami mengirimkan, sehingga proses penerimaan di sini menjadi ... apa namanya sedikit rame, rush begitu, ya, sehingga terhambat akhirnya untuk dilakukan penerimaan (...)

958. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kayak mau menarik uang di bank saja Bapak ini.

959. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Seperti itulah, Pak.

960. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi terus?

961. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Akhirnya sampai pukul 10.00 WIB beberapa bukti dari dapil yang dipersoalkan di Gerindra ini (...)

962. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukti dari Saudara maksudnya?

963. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Betul. Belum bisa masuk (...)

964. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, terus?

965. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Begitu. Sehingga akhirnya itu untuk hari besoknya itu tersalip oleh agenda berikutnya.

966. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, ndak masalah itu kan nanti Saudara masih punya kesempatan untuk menyampaikan alat bukti sebagaimana halnya Pemohon juga sampai pada persidangan dengan anu itu masih ada kesempatan untuk menyampaikan. Itu tidak masalah. Ya, itu ya. Kalau yang belum anu itu. Jadi nanti kalau yang sudah ada ketika giliran Saudara tiba itu nanti disampaikan kepada Mahkamah, begitu ya.

967. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Sekedar untuk memastikan saja karena terkait apa yang sudah masuk karena tercecer itu tadinya per dapil katakanlah seperti Gerindra itu kita ada 4 Dapil, ya tadi dipersoalkan. Nah masing-masing daerah ... KPU daerah itu menyajikan daftar alat buktinya itu per daerah.

968. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

969. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Sehingga ketika disampaikan itu ada yang tercecer. 2 dapil dalam hal ini Kota Sukabumi (...)

970. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi Saudara masih punya kan yang tercecer?

971. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Ya.

972. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini tidak masalah nanti diinikan, ya.

973. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Nah, mohon maaf, Yang Mulia. Jika diperkenankan karena memang barang buktinya sudah ada di sini sejak kemarin untuk kiranya (...)

974. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, ini bukan kesempatan Saudara. Ini masih kesempatan untuk Pemohon dulu. Nanti Saudara diberikan kesempatan itu. Ya, itu. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid.

975. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, konfirmasi ke Gerindra. Baik di permohonan yang tanggal 23 Mei dan yang tadi disebutkan 2 Juli itu ada di Dapil V Bekasi internal di permohonan itu positanya memohon penghitungan suara C-1 dan DA-1 ulang khususnya di Desa Sumbersari Kecamatan Pebayuran. Tapi di petitumnya tidak ada. Ya itu. Ada penjelasan atau klarifikasi?

976. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Mohon izin, Yang Mulia. Misalnya kita akan mengadakan renvoi atau tambahan yang belum masuk ke dalam petitum nanti.

977. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kalau renvoi yang substantif seperti itu sebenarnya sebelumnya sebelum hukum acara sudah tidak boleh. Tapi ya silakan Saudara dan itu juga nanti hak Termohon dan Pihak Terkait yang bersangkutan itu untuk memberikan tanggapan, begitu ya.

978. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

979. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah cukup, ya? Baik, ada lagi yang lain?

980. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12: JOU HASYIM WAIMAHING

Yang Mulia, dari P-3.

981. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana P-3?

982. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12: JOU HASYIM WAIMAHING

Tadi kan sudah dibacakan di Dapil III Kabupaten Bekasi, kan ada angka yang direnvoi.

983. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

984. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12: JOU HASYIM WAIMAHING

Nah itu berkenan bisa kami serahkan.

985. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Renvoinya?

986. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya.

987. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Renvoi yang angka-angka tadi itu?

988. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12: JOU HASYIM WAIMAHING

Ya, angka-angka tadi itu.

989. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti silakan petugas ambil!

990. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102-10-12: JOU HASYIM WAIMAHING

Terima kasih, Yang Mulia.

991. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Sampai saat ini sesuai dengan jadwal seharusnya Partai Berkarya ini adalah di urutan kedua menyampaikan permohonan kepada Mahkamah. Tapi sampai dengan jam ini ternyata yang bersangkutan tidak hadir. Dan kami mempunyai bukti bahwa yang bersangkutan memang sudah dipanggil secara patut sampai dengan saat ini tidak ada kami di sidang terbuka untuk umum perlu kami sampaikan. Karena setelah break, setelah ini kita akan break. Setelah itu kami akan memasuki agenda masih dengan apa namanya penyampaian permohonan Pemohon, tetapi untuk partai yang berbeda. Nah, jadi oleh karena itu, kami akan mempertimbangkan secara tersendiri ... secara tersendiri untuk kasus yang berkenaan dengan Partai Berkarya ini. Karena sampai dengan saat ini kami tidak mendengar berita apapun dari Partai Berkarya. Ya, sampai dengan persidangan ini.

Nah pada Saudara Pemohon dan hadirin yang ... yang mengikuti persidangan ini yang relevan. Nah, untuk pemeriksaan persidangan. Jadi, nanti pemeriksaan persidangan itu nanti isinya memeriksa jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu yang disertai dengan pengesahan alat bukti untuk masing-masing pihak itu. Itu nanti akan dilakukan pada tanggal 9 Juli ... sori, maaf bukan ... bukan 9 Juli. Maaf itu sekarang anunya. Nah itu akan diberitahukan selanjutnya. Jadi dari diberitahukan selanjutnya kalau 9 Juli itu kan bukan ... baru sekarang ini kan sekarang maksudnya. Jadi, hasil persidangan 9 Juli ini untuk acara pendahuluan 9 Juli ini untuk pemeriksaan persidangannya yang agendanya itu tadi, memeriksa jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu dan pengesahan alat buktinya itu nanti akan disampaikan tersendiri dalam panggilan sidang yang akan disampaikan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Begitu, ya. Jadi, untuk Saudara sampai saat ini untuk Pemohon sementara selesai dulu. Kami akan melanjutkan dengan permohonan yang lain dulu untuk pemeriksaan persidangan (...)

992. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PKS: EVI RISNAYANI

Izin, Yang Mulia.

993. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar dulu. Untuk pemeriksaan persidangan itu nanti akan diadakan pemanggilan tersendiri dan nanti akan ada penilaian dari Mahkamah yang berkaitan dengan permohonan-permohonan misal yang

tidak memenuhi syarat dan sebagainya nanti itu akan ada pengumuman tersendiri dari Mahkamah. Bagaimana Pihak Terkait? Dari mana ini?

994. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PKS: EVI RISNAYANI

Ya, kami dari PKS, Yang Mulia.

995. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

996. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PKS: EVI RISNAYANI

Menanggapi untuk Perkara Nomor 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019, dimana Pemohonnya adalah PDIP.

997. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

998. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PKS: EVI RISNAYANI

Kebetulan kami melakukan permohonan yang sama untuk perkara yang sama, wilayah yang sama dengan nomor perkara yang sudah teregister dengan Nomor 10-08-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019.

999. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

1000. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PKS: EVI RISNAYANI

Nah, kami meminta izin jika diperkenankan kepada Yang Mulia untuk dilakukan penundaan terhadap Perkara Nomor 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 ini karena kami juga sedang mengajukan permohonan penundaan untuk Perkara yang sama dengan dapil yang sama di Perkara Nomor 1010-08-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 nanti, Yang Mulia, kami sudah memasukkan surat karena kami menganggap seharusnya KPU sudah melakukan pencocokkan ulang terhadap penghitungan suara yang sudah ada Putusan Bawaslu dengan Putusan Nomor 25 tanggal 12 Juni yang lalu. Kami sudah menyurati KPU Kabupaten Bekasi beberapa kali, sudah mendatangi juga beberapa kali, tetapi kemudian sampai saat ini belum ada respons. Sementara untuk kasus yang sama, mirip dengan jadwal putusan yang sama oleh Bawaslu di daerah Sumatera Selatan yang kami ajukan juga itu sudah selesai, klir

semuanya. Nah, kami meminta jika diperkenankan kasus ini, Majelis berkenan untuk memerintahkan kepada Bawaslu untuk melakukan pencocokan ... eh, mohon maaf izin kepada KPU untuk mencocokkan segera perhitungan ulang untuk wilayah Dapil VII Kabupaten Bekasi yang sama juga dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon PDIP. Demikian, Yang Mulia.

1001. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sesuai dengan hukum acara. Eh, kami ucapkan terima kasih untuk ... apa namanya ... klarifikasi yang disampaikan tetapi sesuai dengan hukum acara kami mungkin untuk melakukan penundaan itu, karena itu kan, satu, di samping kami akan melang ... melanggar hukum acara. Yang kedua, itu akan berbenturan dengan jadwal-jadwal yang lain.

Sedangkan Saudara sudah mengatakan juga untuk memajukan permohonan itu, kan? Tetapi diperiksa dengan panel lain? Nah, itu dengan panel lain. Nanti itu kan ... dan juga mungkin sudah akan disampaikan permohonan yang sama juga, begitu ya. Nah itu ... itu, nanti kan akan ada treatment tersendiri untuk persoalan itu. Nanti kalau memang ada, itu kan tentu akan ada di bagian pertimbangan nanti oleh Mahkamah kalau memang peristiwa itu ada. Karena permasalahannya persoalan ini perkaranya sudah masuk dan diregistrasi oleh Mahkamah dan agenda kita sekarang ini sudah pemeriksaan pendahuluan, sehingga tidak mungkin kami melakukan penundaan itu. Ya, demikian ya. Ya, terima kasih.

Baik. Dengan demikian untuk periode pertama dahulu untuk agenda pemeriksaan pendahuluan ini, untuk kloter pertama kita selesaikan dan sidang kami tunda dan kami lanjutkan untuk pemeriksaan berikutnya sampai dengan pukul ... sampai pukul berapa? Pukul 11.30 WIB. Sidang untuk kloter pertama ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11:13 WIB

Jakarta, 9 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001